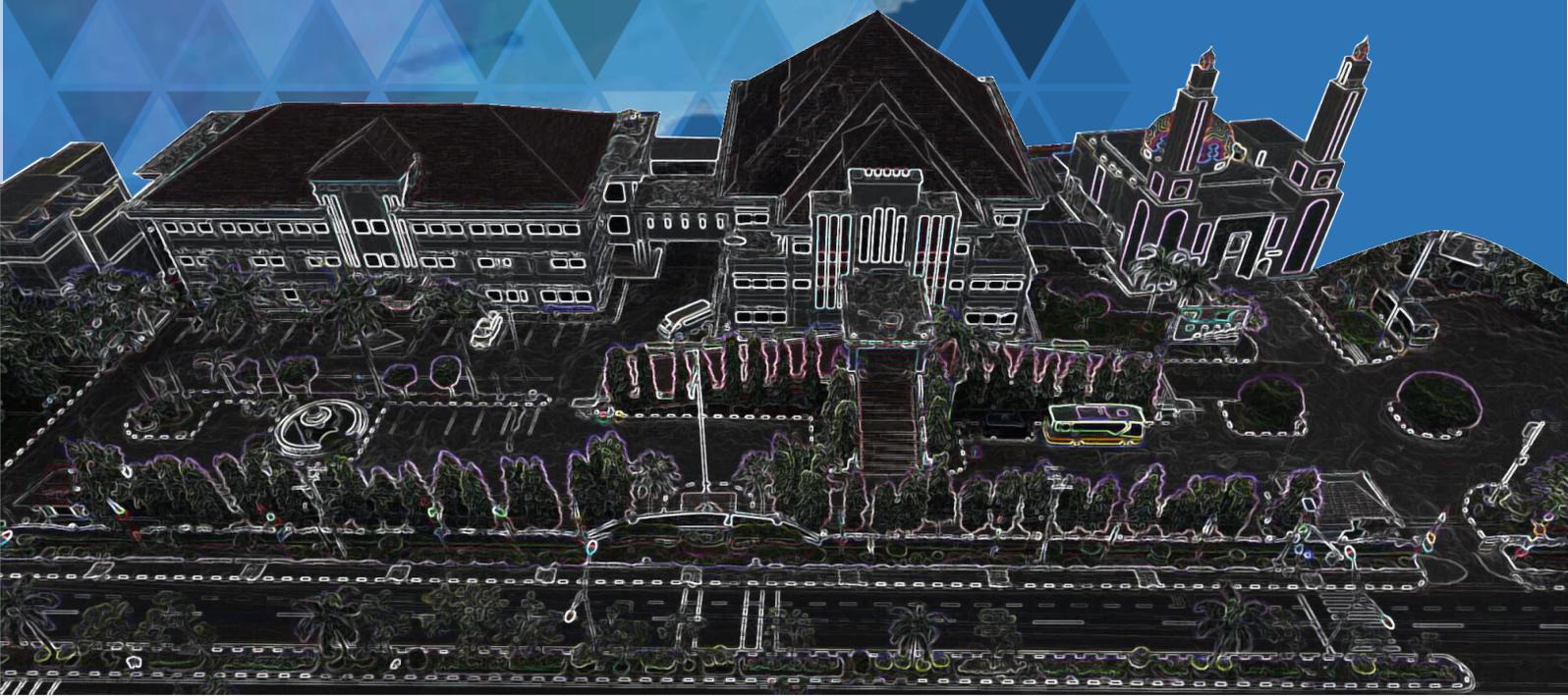




RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Tahun 2025 dapat disusun. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang membuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2025. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan Surat Edaran Wakil Wali Kota Bekasi Nomor: 000.7.2.4/1053/ Bappelitbangda. AP4EP Tentang Pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025, serta arahan kebijakan yang telah ditetapkan sehingga seluruh daya dan upaya yang akan dilakukan dapat berjalan secara sinergis dalam suatu pola sikap dan tindak.

Kepada semua pihak yang telah mengerahkan tenaga dan pikiran dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 ini kami sampaikan ucapan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa emberikan petunjuk dan memberkahi langkah serta upaya kita dalam meningkatkan kinerja guna mewujudkan tujuan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Bekasi, 18 Agustus 2025
Sekretaris DPRD Kota Bekasi


Lia Erliani, A.P., M.Si
NIP. 19750606 199311 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK & CHART	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN LALU	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi.....	12
2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun Lalu	12
2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 s/d Triwulan II.....	29
2.2 Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi	40
2.2.1 Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 ...	41
2.2.2 Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 s/d Triwulan II	64
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD 66	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI ..	71
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	71
3.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional (Renja Tahun 2025)....	71
3.1.2 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional (Perubahan Renja Tahun 2025).....	79
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi.....	88
3.2.1 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025.....	88

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025	91
3.3 Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi	94
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI.....	112
BAB V PENUTUP	119

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan).....	14
Tabel 2. 2 Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi s/d Triwulan I Tahun 2025.....	30
Tabel 2. 3 Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi	40
Tabel 2. 4 Perbandingan Capaian IKU dengan Renstra.....	41
Tabel 2. 5 Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Tahun 2024.....	43
Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja AKIP Tahun 2024.....	60
Tabel 2. 7 Penilaian Komponen AKIP Perangkat Daerah	60
Tabel 3. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan	76
Tabel 3. 2 Tujuan Sekretariat DPRD Kota Bekasi	87
Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Bekasi	90
Tabel 3. 4 Sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi.....	91
Tabel 3. 5 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi.....	92
Tabel 3. 6 Tabel T-C.33 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026.....	96
Tabel 4. 1 Rencana Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026	74
Gambar 3. 2 Konsep Renstra PD	79
Gambar 3. 3 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD.....	80
Gambar 3. 4 Visi Kabinet Merah Putih	81
Gambar 3. 5 8 (delapan) Misi Utama Asta Cita	82
Gambar 3. 6 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi	107

DAFTAR GRAFIK & CHART

Grafik 2. 1 Pagu Murni dan Pagu Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024.....	27
Grafik 2. 2 Realisasi Anggaran s/d Triwulan IV Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024	28
Grafik 2. 3 Pagu Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025.....	39
Grafik 2. 4 Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian "Prosentase Raperda Yang Disahkan Menjadi Perda Tepat Waktu" Tahun 2024, Tahun 2023, dan Tahun	45
Grafik 2. 5 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja "Prosentase Pengesahan Anggaran Tepat Waktu" Tahun 2024	50
Grafik 2. 6 Perbandingan Antara Realisasi Dan Capaian "Prosentase Pengesahan Anggaran Tepat Waktu" Tahun 2024, Tahun 2023, dan Tahun 2022.....	50
Grafik 2. 7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja "Prosentase Pengesahan Anggaran Tepat Waktu" Tahun 2024	56
Grafik 2. 8 Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian.....	57
Grafik 2. 9 Perbandingan Antara Realisasi "Nilai AKIP Perangkat Daerah" Tahun 2024, Tahun 2023, dan Tahun 2022	61
Grafik 2. 10 Realisasi Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025.....	65
Chart 2. 1 Realisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024	28
Chart 3. 1 Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bekasi.....	109
Chart 3. 2 Formasi Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	110
Chart 3. 3 Jumlah PNS Berdasarkan Tingket Eselon.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) mengamanatkan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai Rencana Tahunan. Dalam menyusun dokumen RKPD, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

RKPD Kota Bekasi Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Tahunan dan penyusunannya memperhatikan Seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan. Oleh karena hal tersebut, Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2025 menyusun Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025.

Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 dibuat berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yang merupakan dokumen perencanaan periode 3 (tiga) tahunan yang memuat visi, misi, dan program perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 memuat Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun berjalan, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam menjalankan Program dan Kegiatannya guna mencapai target Kinerja yang telah ditetapkan

sebelumnya didalam Renstra dan bahan evaluasi pencapaian Tujuan dan Sasaran dari tahun ke tahun, sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi perkembangan baru di lingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

Pada tahun berjalan 2025, seiring dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara serentak, maka terdapat perubahan terhadap dokumen perencanaan. Berdasarkan Surat Edaran Wakil Wali Kota Bekasi Nomor: 000.7.2.4/1053/Bappelitbangda.AP4EP tanggal 24 Pebruari 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 yang merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Pebruari 2025 tentang Penyesuaian Arah kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 dibuat berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang memuat penjabaran visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2029 dituangkan kedalam kebijakan, strategi, dan program perencanaan pembangunan mengacu pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Selanjutnya Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 akan dijadikan pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 201 tentang Hasil Verivikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kota Bekasi Nomor 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10);
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 21 Seri E);

21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 9 Seri E);
22. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 1.A Seri E);
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 100 Seri D).
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 13);
25. Surat Edaran Wakil Wali Kota Bekasi Nomor: 000.7.2.4/1053/Bappelitbangda.AP4EP Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 dimaksudkan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Wakil Wali Kota Bekasi Nomor: 000.7.2.4/1053/ Bappelitbangda.AP4EP Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 dan sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang memuat :

1. Mengevaluasi Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 dan menjadi acuan bagi Seluruh kegiatan perencanaan program pembangunan yang dilakukan oleh semua unit di lingkungan Sekretariat DPRD kota Bekasi;

2. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya aspek perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat;
4. Memberikan gambaran kemampuan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan tujuan serta sasaran dalam mencapai Misi dan mewujudkan Visi Kota Bekasi;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.
6. Menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025; dan
7. Menjadi alat observasi untuk melakukan pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pejabat/Pimpinan instansi.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan perubahan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada tahun 2025.
2. Menunjang pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Bekasi tahun 2025.
3. Mengoperasionalkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Sekretariat DPRD sudah disahkan dan pencapaian Renja sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Pada bagian ini berisikan kajian terhadap kinerja berdasarkan indikator kinerja utama yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Pada bagian ini berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD dalam rangka penyampaian kinerja pembangunan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Pada bagian ini dilakukan telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada bagian ini dirumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target Renstra Perubahan Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada bagian ini berisikan rumusan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. Pada bab ini berisi penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan (misal: pencapaian visi dan misi kepala daerah);
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain: jumlah program, dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran

- lokasi lokasi program dan kegiatan dan total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan;
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Ranwal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;
 4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Untuk mengetahui pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun sebelumnya dan capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebelumnya, maka dilakukan pengukuran dan Evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi dengan cara menghitung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun Lalu

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2024 dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemampuan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Kegiatan reviu hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 (n-2) tidak dilakukan karena menggunakan Renstra 2024-2026.

Pada tahun 2024, Sekretariat DPRD Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 56 (lima puluh enam) Sub Kegiatan, dengan anggaran murni sebesar Rp. 200.502.786.458,- (Dua Ratus Miliar Lima Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang kemudian pada anggaran perubahan melaksanakan 2 (dua) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) Sub Kegiatan, menjadi Rp. 209.165.099.233,- (Dua Ratus Sembilan Miliar Seratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 8.662.312.775,- (Delapan Miliar Enam ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi dan pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 2. 1
Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.01	Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota		100%						96.12%	96.12%
		Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD	100%					100%	94.02%	94.02%
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%					100%	100%	100%
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dok	-	-	-	-	12	12	100.00
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Lap	-	-	-	-	3	3	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%					100%	96.62%	96.62%
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55 Org/Bln	-	-	-	-	770	718	93.25
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Lap	-	-	-	-	2	2	100.00
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanam/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanam/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanam/ Semesteran SKPD	15 Lap	-	-	-	-	-	-	-
		Optimalisasi Disiplin Aparatur Sekretariat DPRD		-	-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-	-	-	-	-	-
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD	100%					100%	100%	100%
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%					100%	100%	100%

RANCANGAN AKHIR RENJA PERUBAHAN | 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	14 Org	-	-	-	-	14	14	100
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53 Org	-	-	-	-	48	48	100.00
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD	100%					100%	100%	100%
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%					100%	100%	100%
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	-	1	1	100
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	-	-	-	4	4	100
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	-	-	-	-	3	3	10
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	65.600 Dok	-	-	-	-	4	4	100
4.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	28.990 Lap	-	-	-	-	12	12	100
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.025 Lap	-	-	-	-	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD	100%					100%	90.91%	90.91%
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%					100%	90.91%	90.91%
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	220 Unit	-	-	-	-	220	200	90.91
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD	100%					100%	99.41%	99.41%
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%					100%	99.41%	99.41%
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	539 Lap	-	-	-	-	566	556	98.23
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Lap	-	-	-	-	36	36	100.00
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	-	-	-	-	12	12	100.00
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD	100%					100%	80%	80%
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%					100%	80%	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	-	-	-	-	1	1	100.00
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	-	-	-	-	33	33	100.00
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Unit	-	-	-	-	100	0	0.00
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	211 Unit	-	-	-	-	177	177	100.00
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	-	-	-	-	4	4	100.00
		Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD	100%					100%	92%	92%
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%					100%	89.33%	89.33%
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Org /Bln	-	-	-	-	650	637	98.00
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 Paket	-	-	-	-	7	7	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Org	-	-	-	-	50	35	70.00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD							100%	100%	100%
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	42 Lap	-	-	-	-	12	12	100.00
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		100%					100%	97.77%	97.77%
		Persentase Terasilinasinya Proses Penyusunan dan Penetapan Perda	100%					100%	85.71%	85.71%
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tersedianya Dokumen Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%					100%	85.71%	85.71%
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dok	-	-	-	-	2	2	100.00
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17 Dok	-	-	-	-	10	10	100.00
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	10 Dok	-	-	-	-	12	12	100.00
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik yang difasilitasi	10 Dok	-	-	-	-	7	2	28.57
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	1 Dok	-	-	-	-	1	1	100.00

RANCANGAN AKHIR RENJA PERUBAHAN | 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD	100%					100%	100%	100%
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Tersedianya Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%					100%	100%	100%
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dok	-	-	-	-	1	1	100.00
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dok	-	-	-	-	1	1	100.00
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dok	-	-	-	-	1	1	100.00
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dok	-	-	-	-	1	1	100.00
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dok	-	-	-	-	1	1	100.00
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dok	-	-	-	-	1	1	100.00
		Persentase Terasilinasinya Kegiatan DPRD	100%					100%	100%	100%
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya Dokumen dan Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%					100%	100%	100%
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	14 Lap	-	-	-	-	12	12	100.00
4.02.02.2.03.02	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	14 Lap	-	-	-	-	12	12	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.02.2.03.03	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	14 Lap	-	-	-	-	12	12	100.00
4.02.02.2.03.04	Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	14 Lap	-	-	-	-	12	12	100.00
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dok	-	-	-	-	1	1	100.00
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dok	-	-	-	-	1	1	100.00
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dok	-	-	-	-	1	1	100.00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Tersedianya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%					100%	100%	100%
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0 Dok	-	-	-	-	1	1	100.00
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	14 Dok	-	-	-	-	6	6	100.00
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	204 Org	-	-	-	-	204	204	100.00
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	54 Org	-	-	-	-	54	54	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	52 Dok	-	-	-	-	12	12	100.00
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	3 Dok	-	-	-	-	3	3	100.00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tersedianya Dokumen dan Laporan hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%					100%	100%	100%
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Lap	-	-	-	-	3	3	100.00
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun	3 Dok	-	-	-	-	3	3	100.00
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dok	-	-	-	-	2	2	100.00
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Tersedianya Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%					100%	100%	100%
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Lap	-	-	-	-	12	12	100.00
4.02.02.2.08	Peningkatan Kapasitas DPRD	Tersedianya Dokumen dan Laporan hasil Fasilitasi Tugas DPRD	100%					100%	100%	100%
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13 Dok	-	-	-	-	5	5	100.00
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	3 Lap	-	-	-	-	1	1	100.00
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan	3 Dok	-	-	-	-	3	3	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Badan Musyawarah	36 Dok	-	-	-	-	12	12	100.00

Catatan : Data disesuaikan dengan target Renstra 2024-2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat capaian kinerja n-1 (2024), adapun capaian kinerja n-2 (2023) dan n-3 (2022 tidak disajikan karena Renstra yang digunakan adalah Renstra 2024-2026. Melalui tabel tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah 100% (Berdasarkan Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024) adalah:
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, capaian adalah 96.62%. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD bersifat situasional dan menyesuaikan kebutuhan, yaitu yang dalam pencapaian target berfokus pada jumlah orang yang menerima gaji atau tunjangan;
 - b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, capaian adalah 90.91%;
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, capaian adalah 99.41%. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat bersifat situasional dengan jumlah surat menyurat terkirim.
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, capaian kinerja 80%. Tidak tercapainya kinerja karena pada Sub Kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya hanya teralisasi 200 unit dari 220 unit. Hal ini dikarenakan terkendala terkait pengadaan dan distribusi barang;
 - e. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, capaian adalah 89.33%. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel tidak dilaksanakan karena masih dilaksankannya proses renovasi gedung Sekretariat DPRD Kota Bekasi, dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD tidak mencapai target

kinerja dikarenakan sebageian dewan telah melakukan medical check up secara mandiri sebagai syarat calon legislatif.

- f. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, capaian adalah 85.71%. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik hanya terealisasi 28,57% yaitu dengan tersampainya usulan raperda inisiatif DPRD Kota Bekasi Tahun 2024.
2. Program/kegiatan/sub. Kegiatan yang capaian kinerjanya mencapai 100% adalah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD.
3. Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan yang capaian kinerjanya melebihi 100% adalah tidak ada.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan adalah:
 - a. Belum optimalnya pengendalian, dan kurangnya Monitoring dan Evaluasi (Monev) perangkat daerah sebagai dasar untuk perbaikan kinerja dan dalam rangka pencapaian target kinerja yang berkontribusi dalam pencapaian target IKU secara berjenjang.
 - b. Belum memudahinya Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan perencanaan dan pelaporan, yang belum mampu menyusun indikator kinerja yang tepat syarat, sehingga menyulitkan proses pelaporan dan monev.

Indikasi:

- Masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman dalam hal perencanaan, contohnya: target kegiatan dapat dievaluasi dan disesuaikan pada saat Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dalam rangka pencapaian target kinerja dan pencapaian target IKU.
 - Pelaporan pada Aplikasi Simpelbang dan Aplikasi Monev yang belum tepat syarat dan tepat waktu.
- c. Rendahnya kualitas data dan informasi, diakibatkan pengumpulan data masukan capaian/realisasi dari Perangkat Daerah terhambat/ beberapa terlambat sehingga waktu pengumpulan dan pengolahan data serta perumusan analisis dan rekomendasi menjadi lebih singkat.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah tidak dapat tercapainya target keempat indikator program tersebut di atas, yang dikhawatirkan berpengaruh juga terhadap pencapaian indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah”.
6. Kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:
- a. Mengoptimalkan pengendalian, dan Monitoring dan Evaluasi (Monev) mulai dari level bagian sampai dengan level perangkat daerah, sebagai dasar untuk perbaikan kinerja dan dalam rangka pencapaian target kinerja yang berkontribusi dalam pencapaian target IKU.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, bulanan, dan triwulanan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai IKU;
 - c. Meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan perencanaan dan pelaporan mulai dari level bagian

sampai dengan level perangkat daerah, untuk mampu menyusun indikator kinerja yang tepat syarat, sehingga memahami tata cara proses pelaporan dan monev, sehingga kinerja dapat diukur.

- d. Meningkatkan kualitas data dan informasi, sehingga diperoleh data yang tepat dan akurat, sebagai dasar pengolahan data, perumusan analisis, dan rekomendasi.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 melaksanakan kegiatannya didukung anggaran dengan anggaran murni sebesar Rp. 200.502.786.458,- (Dua Ratus Miliar Lima Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang kemudian pada anggaran perubahan menjadi Rp. 209.165.099.233,- (Dua Ratus Sembilan Miliar Seratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah

Grafik 2. 1
Pagu Murni dan Pagu Perubahan Sekretariat DPRD
Kota Bekasi Tahun 2024

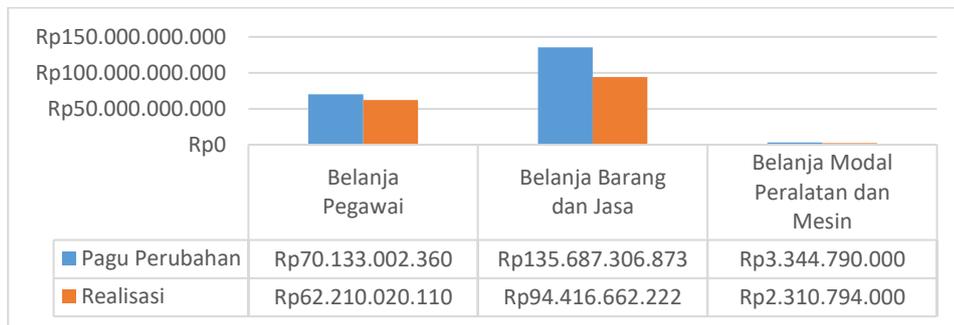


Sumber: SIPD Kota Bekasi, 2024

Berdasarkan grafik di atas, terdapat penambahan anggaran pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 sebesar Rp. 8.662.312.775,- (Delapan Miliar Enam ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) sebagai sarana pendukung Fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD tahun 2024.

Adapun realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 2. 2
Realisasi Anggaran s/d Triwulan IV
Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024



Sumber: SIPD Kota Bekasi, 2024 (data diolah)

1. Belanja Pegawai ditargetkan sebesar Rp. 70.133.002.360,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 62.210.020.110,-, sehingga persentase capaian sebesar 88.70% dari total anggaran perubahan tahun 2024.
2. Belanja Barang dan Jasa ditargetkan sebesar Rp. 135.687.306.873,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 94.416.662.222,-, sehingga persentase capaian sebesar 69.58% dari total anggaran perubahan tahun 2024.
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin ditargetkan sebesar Rp. 3.344.790.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.310.794.000,-, sehingga persentase capaian sebesar 69.09% dari total anggaran perubahan tahun 2024.

Chart 2. 1

Realisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024



Sampai dengan akhir tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Bekasi merealisasikan anggaran sebesar Rp. 158.937.476.332,- atau sebesar 75.99%. Tidak terserapnya anggaran sebesar 24.01% dikarenakan pelaksanaan kegiatan berdasarkan berdasarkan kebutuhan, sehingga terdapat efisiensi anggaran, dan adanya Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: SE-1/PK/2024 terkait Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024, serta Surat Wali Kota Bekasi Nomor : 900.1.15.1/5686/SETDA.Bang tentang pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berpengaruh pada penyerapan anggaran kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Berdasarkan Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024, rata-rata capaian kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 **“Sangat Tinggi”** dengan nilai 100%, capaian program **“Sangat Tinggi”** dengan nilai 97.77%, sehingga rata-rata capaian kinerja dari seluruh program adalah 96.12% dengan predikat **“Sangat Tinggi”**, dan capaian anggaran pada tahun 2024 adalah sebesar 75.99%.

2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 s/d Triwulan II

Adapun Evaluasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi s/d Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN RKPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN			ANGGARAN		
					TARGET	REALISASI s/d TRIWULAN II	%	PAGU	REALISASI s/d TRIWULAN II	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		%	100	35,27	35,3	232.840.644.843,00	66.310.340.089,00	28,5
		SEKRETARIAT DPRD		%	100	35,27	35,3	232.840.644.843,00	66.310.340.089,00	28,5
	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		%	100	40,86	40,9	111.480.241.704,00	40.935.564.283,00	36,7
			Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							
		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		%	100	45,83	45,8	80.000.000,00	4.236.000,00	5,3
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	3	25	40.000.000,00	4.236.000,00	10,59
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	2	66,67	40.000.000,00	0	0
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	100	54,7	54,7	15.063.367.000,00	6.038.907.118,00	40,1

NO	SASARAN RKPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN			ANGGARAN		
					TARGET	REALISASI s/d TRIWULAN II	%	PAGU	REALISASI s/d TRIWULAN II	%
3		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	2086	642	30,78	14.999.367.000,00	6.029.386.618,00	40,2
4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	100	40.000.000,00	9.520.500,00	23,8
5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	15	5	33,33	24.000.000,00	0	0
			Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100					
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	15,46	15,5	951.170.000,00	54.291.600,00	5,71
6		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	52	2	3,85	379.170.000,00	2.101.000,00	0,55
7		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	48	13	27,08	572.000.000,00	52.190.600,00	9,12
			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100					
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	56,94	56,9	6.679.329.562,00	1.331.941.500,00	19,9
8		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	150.000.000,00	0	0

NO	SASARAN RKPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN			ANGGARAN		
					TARGET	REALISASI s/d TRIWULAN II	%	PAGU	REALISASI s/d TRIWULAN II	%
9		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	3	75	2.937.763.000,00	626.566.500,00	21,33
10		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	2	66,67	459.116.562,00	54.100.000,00	11,78
11		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	0	0	580.000.000,00	0	0
12		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	6	50	1.552.450.000,00	410.850.000,00	26,46
13		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	6	50	1.000.000.000,00	240.425.000,00	24,04
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	100	13,64	13,6	1.200.000.000,00	0	0
14		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	220	30	13,64	1.200.000.000,00	0	0
			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	100	30,91	30,9	6.365.183.760,00	2.746.108.392,00	43,1
15		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	566	6	1,06	25.000.000,00	974.000,00	3,9
16		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	18	50	1.200.000.000,00	551.618.396,00	45,97

NO	SASARAN RPKD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN			ANGGARAN		
					TARGET	REALISASI s/d TRIWULAN II	%	PAGU	REALISASI s/d TRIWULAN II	%
17		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	5	41,67	5.140.183.760,00	2.193.515.996,00	42,67
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	100	44,74	44,7	8.562.000.000,00	2.325.073.149,00	27,2
18		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	0	0	120.000.000,00	0	0
19		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33	15	45,45	510.000.000,00	35.179.359,00	6,9
20		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	100	100	100	100.000.000,00	99.960.000,00	99,96
21		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	177	50	28,25	832.000.000,00	0	0
22		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	2	50	7.000.000.000,00	2.189.933.790,00	31,28
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		%	100	17,95	18	71.579.191.382,00	28.286.660.744,00	39,5
23		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	650	350	53,85	70.644.191.382,00	28.286.660.744,00	40,04
24		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	6	0	0	770.000.000,00	0	0
25		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	50	0	0	165.000.000,00	0	0

NO	SASARAN RKPd	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN			ANGGARAN		
					TARGET	REALISASI s/d TRIWULAN II	%	PAGU	REALISASI s/d TRIWULAN II	%
		Layanan Administrasi DPRD		%	100	50	50	1.000.000.000,00	148.345.780,00	14,8
26		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12	6	50	1.000.000.000,00	148.345.780,00	14,83
	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA	%	1	30,59	30,6	121.360.403.139,00	25.374.775.806,00	20,9
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		%	100	16	16	21.102.373.000,00	1.511.262.649,00	7,16
27		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	2	1	50	1.450.000.000,00	196.264.038,00	13,54
28		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	10	1	10	9.104.205.000,00	487.691.680,00	5,36
29		Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	10	2	20	4.135.068.000,00	812.306.931,00	19,64
30		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	7	0	0	5.822.010.000,00	0	0
31		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	1	0	0	591.090.000,00	15.000.000,00	2,54
			Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD	%	100					
		Pembahasan Kebijakan Anggaran		%	100	0	0	7.586.420.000,00	0	0

NO	SASARAN RKPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN			ANGGARAN		
					TARGET	REALISASI s/d TRIWULAN II	%	PAGU	REALISASI s/d TRIWULAN II	%
32		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	0	0	2.000.000.000,00	0	0
33		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	0	0	1.500.000.000,00	0	0
34		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	0	0	735.000.000,00	0	0
35		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	0	0	1.116.420.000,00	0	0
36		Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	1	0	0	735.000.000,00	0	0
37		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	0	0	1.500.000.000,00	0	0
			Persentase Terfasilitasinya kegiatan DPRD	%	100					
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		%	100	42,86	42,9	33.727.514.928,00	7.852.652.464,00	23,3
38		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	12	6	50	5.111.670.264,00	1.383.309.010,00	27,06
39		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	12	6	50	5.111.670.264,00	1.343.571.474,00	26,28
40		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	6	50	5.111.670.264,00	1.282.488.893,00	25,09

NO	SASARAN RKPd	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN			ANGGARAN		
					TARGET	REALISASI s/d TRIWULAN II	%	PAGU	REALISASI s/d TRIWULAN II	%
41		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	12	6	50	5.111.670.264,00	1.169.110.518,00	22,87
42		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	0	0	1.700.000.000,00	0	0
43		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	1	0	0	9.000.000.000,00	2.092.952.674,00	23,26
44		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1	1	100	2.580.833.872,00	581.219.895,00	22,52
		Peningkatan Kapasitas DPRD		100%	100	33,67	33,7	22.932.439.000,00	4.172.818.426,00	18,2
45		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6	1	16,67	5.834.827.000,00	1.445.587.102,00	24,78
46		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	210	23	10,95	2.341.612.000,00	189.200.000,00	8,08
47		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	54	31	57,41	756.000.000,00	300.000.000,00	39,68
48		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	12	6	50	12.000.000.000,00	2.044.210.264,00	17,04
49		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	3	1	33,33	2.000.000.000,00	193.821.060,00	9,69
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD	%	100	66,67	66,7	12.926.007.500,00	7.498.597.700,00	58

NO	SASARAN RKPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN			ANGGARAN		
					TARGET	REALISASI s/d TRIWULAN II	%	PAGU	REALISASI s/d TRIWULAN II	%
50		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	3	2	66,67	284.182.500,00	132.520.000,00	46,63
51		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	3	2	66,67	925.000.000,00	83.535.200,00	9,03
52		Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3	2	66,67	11.716.825.000,00	7.282.542.500,00	62,15
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		%	100	50	50	3.089.068.000,00	396.202.877,00	12,8
53		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	12	6	50	3.089.068.000,00	396.202.877,00	12,83
		Fasilitasi Tugas DPRD		%	100	37,5	37,5	19.996.580.711,00	3.943.241.690,00	19,7
54		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	12	0	0	5.495.820.000,00	0	0
55		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	1	1	100	1.209.194.711,00	427.790.509,00	35,38
56		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	3	0	0	11.991.566.000,00	2.819.200.602,00	23,51
57		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	12	6	50	1.300.000.000,00	696.250.579,00	53,56

Sumber: <https://siencang.bekasikota.go.id/monev2025> (Data diolah)

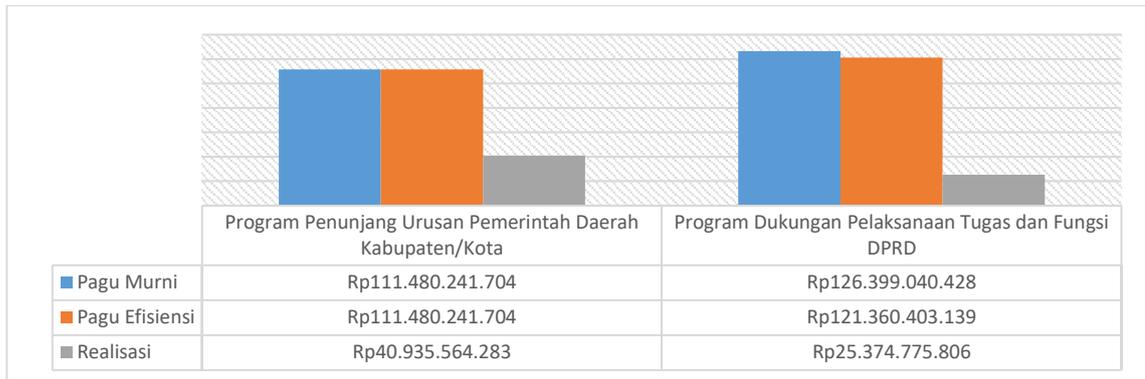
Tabel di atas menunjukkan bahwa sudah terdapat beberapa Kegiatan/ Sub. Kegiatan yang sudah dilaksanakan, terlihat dari realisasi yang dihasilkan, dan sudah sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan. Adapun beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan lainnya belum terdapat keluarannya dikarenakan belum adanya jadwal pembahasan/ pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Evaluasi hasil terhadap renja perangkat daerah Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 – Triwulan II, rata-rata capaian kinerja kegiatan adalah **35.27%** dengan predikat kinerja kegiatan adalah **“Sangat Rendah”**. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hal ini tentunya dikarenakan banyak kegiatan yang baru dilaksanakan pada Triwulan II dan seterusnya.

Kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab belum tercapainya Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengendalian, dan Monitoring dan Evaluasi (Monev) mulai dari level bagian sampai dengan level perangkat daerah, sebagai dasar untuk perbaikan kinerja dan dalam rangka pencapaian target kinerja yang berkontribusi dalam pencapaian target IKU.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, bulanan, dan triwulanan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai IKU .
3. Meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan perencanaan dan pelaporan mulai dari level bagian sampai dengan level perangkat daerah, untuk mampu menyusun indikator kinerja yang tepat syarat, sehingga memahami tata cara proses pelaporan dan monev, sehingga kinerja dapat diukur.
4. Meningkatkan kualitas data dan informasi, sehingga diperoleh data yang tepat dan akurat, sebagai dasar pengolahan data, perumusan analisis, dan rekomendasi.

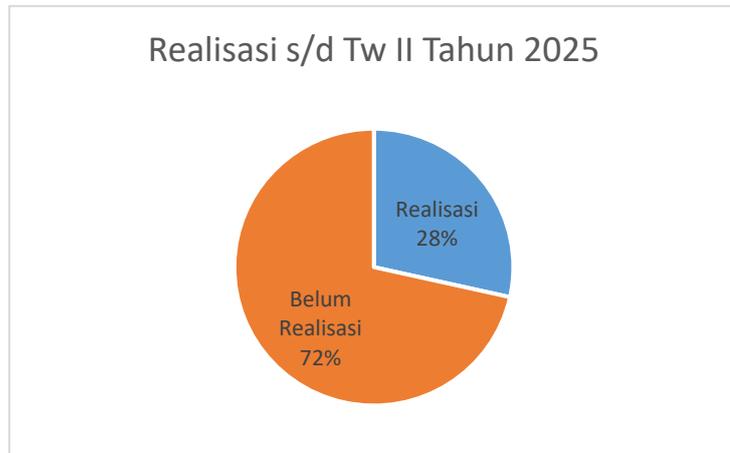
Grafik 2. 3
Pagu Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025



Sumber: SIPD Kota Bekasi, 2025

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 melaksanakan kegiatannya didukung anggaran, yaitu untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 111.480.241.704,- dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp. 126.399.040.428,-, sehingga total anggaran murni Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 237.879.282.132,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah). Adapun pada Triwulan II terdapat efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Sekretariat DPRD Kota Bekasi melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.038.637.289,- (Lima Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), sehingga total pagu anggaran setelah dilakukan efisiensi menjadi Rp. 232.840.644.843,- (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Enam ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

Chart 2.2
Realisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi s/d Triwulan II Tahun 2025



2.2 Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Untuk mencapai keberhasilan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 maka Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki 2 (dua) sasaran yang harus diwujudkan yaitu : (1) Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah; dan (2) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun capaian kinerja IKU pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu	-	-	-	75.30%	75.40%	75.50%	-	60.87	100	100	-

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	-	-	-	75.30%	75.40%	75.50%	-	100	100	100	-
3	Prosentase Pembahasan LPKJ Kepala Daerah tepat waktu	-	-	-	75.30%	75.40%	75.50%	-	100	100	100	-
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	-	77.70	77.80	77.90	-	69.62	77.80	77.90	-

2.2.1 Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024

Untuk mencapai keberhasilan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 maka dapat kita dilihat dari capaian indikator yang ada pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 4
Perbandingan Capaian IKU dengan Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra			Realisasi Capaian			Realisasi Kinerja (%)		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	%	75.30	75.40	75.50	60.87	-	-	80.84	-	-
	Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	%	75.30	75.40	75.50	100	-	-	132.80	-	-
	Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	%	75.30	75.40	75.50	100	-	-	132.80	-	-
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	77.70	77.8	77.9	63.38	-	-	69.62	-	-

Sumber : Data diolah Bagian Program dan Perencanaan, Tahun 2025

Pada indikator kinerja **“Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu”**, target dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk tahun 2024 adalah 75.30%. Pada tahun 2024, realisasi capaian yang tercatat

adalah 60.87%, yang sedikit lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Kinerja ini menunjukkan adanya ruang perbaikan untuk mencapai target pada tahun-tahun mendatang.

Pada indikator kinerja **“Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu”**, juga memiliki target yang sama, yaitu 75.30% pada tahun 2024. Pada tahun tersebut, capaian yang tercatat mencapai 100%, yang berarti pengesahan anggaran telah dilakukan tepat waktu, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik. Capaian ini juga menunjukkan kinerja yang optimal di tahun 2024, dengan potensi untuk terus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan di tahun 2025 dan 2026.

Pada indikator kinerja **“Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu”**, memiliki target yang sama dengan dua indikator lainnya, yaitu 75.30%. Pada tahun 2024, capaian yang tercatat adalah 100%, yang menandakan bahwa pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah berhasil dilaksanakan tepat waktu. Seperti halnya dengan pengesahan anggaran, capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan dan menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Pada indikator kinerja **“Nilai AKIP Perangkat Daerah”** yang diukur dengan satuan nilai, terdapat target dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk tahun 2024 sebesar 77.70. Namun, pada tahun 2024, realisasi nilai AKIP yang tercatat adalah 69.62 atau sebesar 89.60%. yang menunjukkan pencapaian yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, yang berarti meskipun ada kekurangan dibandingkan target yang diinginkan, terdapat pencapaian yang cukup signifikan. Hal ini memberikan gambaran bahwa terdapat ruang perbaikan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah di tahun-tahun mendatang.

Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 telah menetapkan target kinerja selama 3 tahun, sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 2.2. Untuk tahun 2025 dan 2026, tidak terdapat data

yang tersedia atau tercatat untuk nilai capaian dan target untuk indikator sasaran “Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda Tepat Waktu” dan “Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu” serta “Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu”, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan atau analisis lebih lanjut terkait kinerja perangkat daerah pada tahun-tahun tersebut. Meskipun tidak ada data capaian untuk tahun 2025 dan 2026, pencapaian yang sangat baik pada tahun 2024 memberikan gambaran bahwa kinerja ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi berupa kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya. Pada Tahun 2024, Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti tampak pada tabel di bawah:

Tabel 2. 5
Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024 (%)
I	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	75.3	60.87	80.84
		Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	75.3	100	132.80
		Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	75.3	100	132.80
II	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	77.7	69.62	89.60

Sumber : Data Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

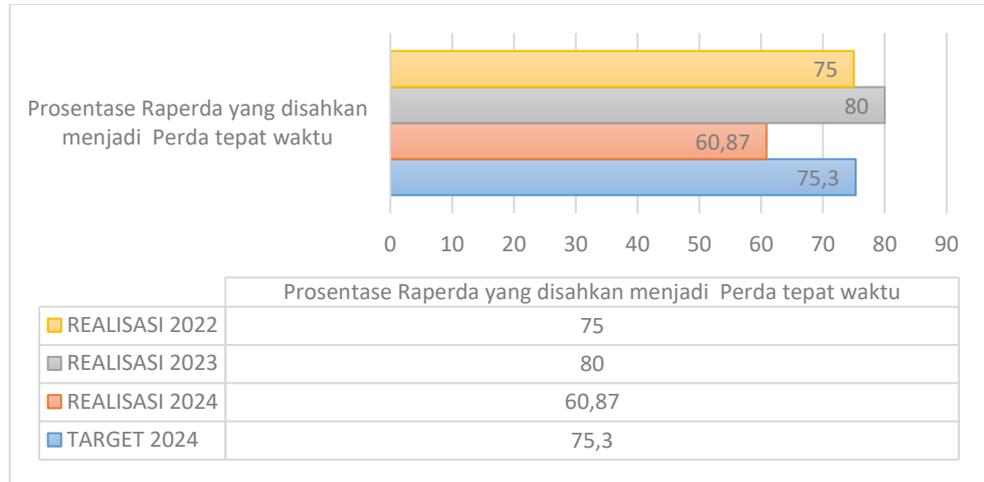
1. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD" yang didukung oleh indikator kinerja sasaran pertama yaitu "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" telah tercapai di bawah target yang telah ditetapkan dengan capaian nilai yang diperoleh sebesar 60.87 dari target 75.30 atau bila di persentasekan mencapai 80.84%.

Nilai capaian yang di peroleh dari indikator "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" diperoleh melalui hasil realisasi Pansus yang sudah paripurna di Tahun 2024, yang difasilitasi oleh Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Dari 17 (tujuh belas) yang sudah diparipurnakan oleh Pansus, 3 (tiga) diantaranya bukan merupakan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) melainkan Peraturan DPRD. Kemudian dari 14 (empat belas) judul Raperda yang paripurnakan terdapat 10 (sepuluh) judul Raperda yang merupakan fasilitasi dari penyelesaian target Raperda dari tahun-tahun sebelumnya, sedangkan Raperda yang disahkan di Tahun 2024 yang merupakan target di Tahun 2024.

Untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran di Tahun 2024 dengan capaian indikator sasaran Tahun 2023 dapat dilihat pada chart berikut:

Grafik 2. 4
Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian
"Prosentase Raperda Yang Disahkan Menjadi Perda Tepat Waktu"
Tahun 2024, Tahun 2023, dan Tahun



Sumber data: Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Indikator capaian nilai sasaran "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" bila dilihat dari nilai realisasi kinerja dari tahun ke-tahun. Nilai pada Tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, demikian juga bila melihat target pada Tahun 2024 nilai realisasi kinerja yang diperoleh pada Tahun 2024 masih di bawah target yang telah ditetapkan, terdapat selisih nilai 14.43% dari target yang telah ditetapkan.

Nilai tersebut didapatkan dari penghitungan realisasi pengesahan judul Raperda yang ditetapkan menjadi target pengesahan di Tahun 2024. Di Tahun 2024 terdapat 14 (empat belas) Raperda yang disahkan menjadi Perda sebanyak 10 (sepuluh) di antaranya merupakan target pengesahan di tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan 4 (empat) Raperda yang disahkan merupakan Target pengesahan Paripurna di Tahun 2024

Tidak tercapainya target pada indikator "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" pada tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi. Salah satu penyebab utama adalah adanya keterlambatan dalam proses penyusunan dan pembahasan Raperda. Proses ini melibatkan berbagai pihak, baik dari sisi eksekutif maupun legislatif, yang memerlukan koordinasi yang intensif dan waktu yang cukup panjang untuk memastikan bahwa setiap Raperda memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Keterbatasan waktu dan sumber daya yang ada sering kali menghambat kelancaran proses ini, yang pada akhirnya berdampak pada pengesahan Raperda yang tidak tepat waktu.

Selain itu, hambatan yang lebih mendalam terletak pada kurangnya efektivitas dalam pengelolaan waktu dan prioritas pembahasan Raperda. Beberapa Raperda yang seharusnya disahkan pada tahun 2024 merupakan target yang belum tercapai dari tahun sebelumnya, menunjukkan adanya backlog atau tumpukan pekerjaan yang belum selesai. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam perencanaan dan pengelolaan agenda kerja yang lebih baik di Sekretariat DPRD. Di samping itu, tantangan eksternal seperti dinamika politik yang berubah-ubah dan perbedaan pandangan antar anggota DPRD juga turut memengaruhi kelancaran proses pengesahan Raperda. Dengan demikian, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan koordinasi antar pihak terkait, pengelolaan waktu yang lebih efisien, serta komitmen yang kuat untuk menyelesaikan setiap tahapan proses pengesahan Raperda secara tepat waktu.

Beberapa upaya yang akan dilakukan di Tahun 2024 untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi capaian kinerja indikator sasaran "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Antar Pihak

Salah satu upaya utama adalah meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif, serta antar komisi dan badan yang terlibat dalam pembahasan Raperda. Dengan komunikasi yang lebih baik, hambatan terkait perbedaan pandangan atau kurangnya pemahaman dapat diminimalkan, sehingga proses pembahasan dan pengesahan Raperda dapat berjalan lebih lancar dan sesuai jadwal.

2. Perbaikan Perencanaan dan Pengelolaan Waktu

Perencanaan yang lebih matang dan pengelolaan waktu yang lebih efektif sangat penting untuk menghindari keterlambatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan jadwal yang lebih realistis dan fleksibel, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi proses pengesahan Raperda. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kemajuan pembahasan Raperda juga perlu dilakukan untuk memastikan setiap tahapan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

3. Penyelesaian Backlog Raperda

Untuk mengurangi tumpukan pekerjaan yang terjadi akibat Raperda yang belum disahkan pada tahun sebelumnya, langkah-langkah proaktif seperti prioritas pengesahan Raperda yang tertunda perlu dilakukan. Pengesahan Raperda yang menjadi target tahun sebelumnya harus menjadi perhatian utama, agar tidak mengganggu target tahun berjalan.

4. Peningkatan Kapasitas SDM Sekretariat DPRD

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Sekretariat DPRD sangat penting untuk mendukung kelancaran proses administratif dan teknis dalam pengelolaan Raperda. Pelatihan dan pengembangan kompetensi staf terkait penyusunan, pembahasan, dan pengesahan Raperda dapat mempercepat proses dan mengurangi kesalahan yang dapat menghambat pengesahan tepat waktu.

5. Optimasi Teknologi dan Sistem Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau dan mengelola seluruh proses pembahasan Raperda juga dapat mempercepat jalannya pengesahan. Sistem yang terintegrasi akan mempermudah koordinasi, monitoring, dan pelaporan terkait status pembahasan Raperda, sehingga pihak-pihak terkait dapat segera mengambil tindakan bila terjadi keterlambatan.

6. Penguatan Komitmen dan Dukungan Politik

Komitmen yang kuat dari seluruh anggota DPRD untuk menyelesaikan pembahasan dan pengesahan Raperda sesuai target juga merupakan faktor penting. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperkuat dukungan politik terhadap prioritas pengesahan Raperda, serta memastikan bahwa setiap anggota DPRD memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya proses ini untuk kemajuan daerah.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut secara konsisten, diharapkan dapat tercapai pengesahan Raperda yang tepat waktu dan meningkatkan kualitas layanan serta akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD ke depan.

2. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu

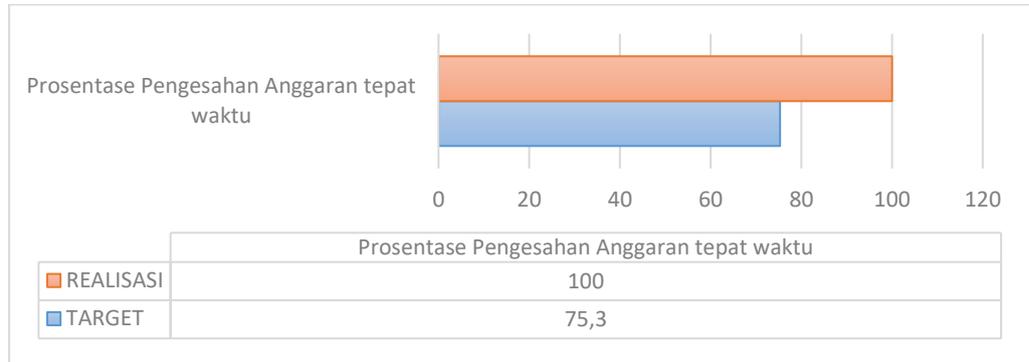
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD" yang didukung oleh indikator kinerja sasaran pertama yaitu "Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu" telah tercapai di atas target yang telah ditetapkan dengan capaian nilai yang diperoleh sebesar 100 dari target 75.30 atau bila di persentasekan mencapai 132.80%.

Nilai capaian yang di peroleh dari indikator "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" diperoleh melalui hasil realisasi pengesahan anggaran di Tahun 2024, yang difasilitasi oleh Bagian Fasilitasi Pengawasan Penganggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 13);
2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 13).

Dengan melihat Chart 2.4 di bawah, target tahun 2024 sebesar 75.30%, sementara realisasi 100% sudah mencapai target maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator kinerja Prosentase Fasilitasi Pengesahan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2024 sebesar 132.80%.

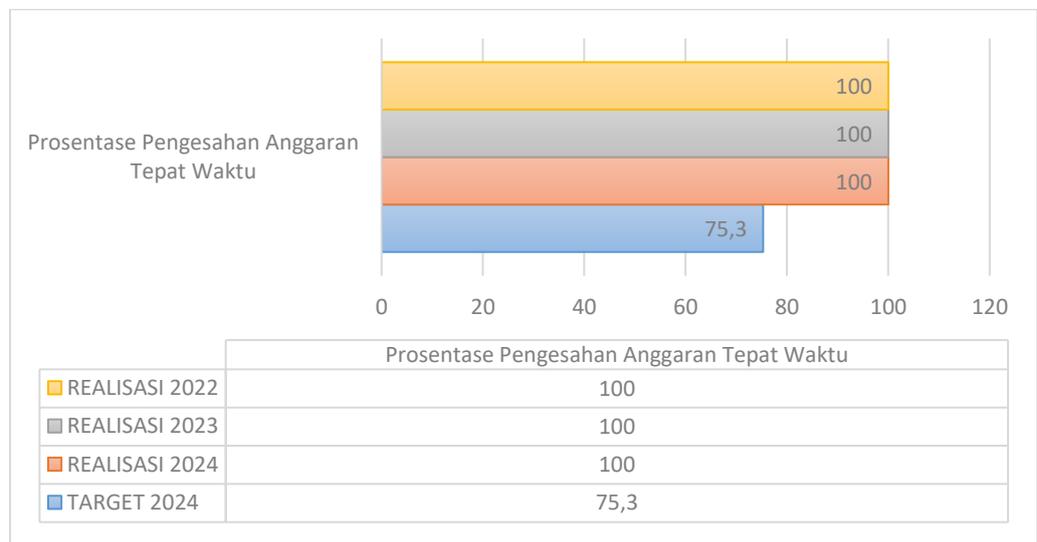
Grafik 2. 5
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
"Prosentase Pengesahan Anggaran Tepat Waktu" Tahun 2024



Sumber data: Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran di Tahun 2024 dengan capaian indikator sasaran Tahun 2023 dapat dilihat pada chart berikut:

Grafik 2. 6
Perbandingan Antara Realisasi Dan Capaian
"Prosentase Pengesahan Anggaran Tepat Waktu"
Tahun 2024, Tahun 2023, dan Tahun 2022



Sumber data: Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Pada Sasaran Kedua, yaitu "Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD," dengan fokus pada indikator "Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu." Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa Sekretariat DPRD telah berhasil mencapai target yang ditetapkan pada setiap tahun, dengan pencapaian 100% untuk tahun 2022, 2023, dan 2024, yang melebihi target sebesar 75.3%.

Capaian ini menunjukkan bahwa pengesahan anggaran dilakukan tepat waktu, yang merupakan indikator penting dalam menjaga kelancaran operasional dan transparansi anggaran pemerintah daerah. Keberhasilan ini mencerminkan adanya perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan yang baik dalam proses pengesahan anggaran, serta komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait, baik dari eksekutif maupun legislatif. Meskipun demikian, untuk menjaga pencapaian ini, Sekretariat DPRD perlu terus memastikan bahwa proses pengesahan anggaran tetap berjalan lancar tanpa ada hambatan, dengan meningkatkan pengelolaan waktu, komunikasi yang lebih baik antar pihak terkait, serta memanfaatkan teknologi yang dapat mendukung efisiensi dalam proses ini.

Keberhasilan Sekretariat DPRD dalam mencapai 100% pada indikator "Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu" pada tahun 2022, 2023, dan 2024 dapat dijelaskan melalui beberapa faktor rasional yang mencerminkan keberhasilan manajerial dan koordinasi yang baik.

Pertama, **perencanaan yang matang dan terstruktur** memainkan peran penting dalam pencapaian ini. Sekretariat DPRD, bersama dengan eksekutif, telah merancang jadwal yang realistis untuk proses pengesahan anggaran, dengan memperhatikan waktu yang cukup untuk pembahasan, revisi,

dan persetujuan. Penyusunan jadwal yang baik dan pengaturan waktu yang efisien memastikan bahwa setiap tahapan dalam pengesahan anggaran dapat diselesaikan tepat waktu.

Kedua, **koordinasi yang efektif antara DPRD dan Pemerintah Daerah** juga menjadi faktor kunci. Komunikasi yang terbuka dan kolaborasi yang erat antara anggota DPRD, komisi terkait, serta instansi pemerintah yang mengusulkan anggaran mempermudah proses diskusi dan pengambilan keputusan. Tidak adanya kendala yang signifikan dalam koordinasi ini memungkinkan proses pengesahan anggaran berjalan dengan lancar sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

Ketiga, **kesiapan administratif dan sistem yang mendukung** turut berperan dalam kelancaran proses ini. Sekretariat DPRD telah memanfaatkan sistem administrasi dan teknologi yang memadai untuk memantau, mengelola, dan menyampaikan dokumen anggaran secara efisien. Hal ini meminimalisir hambatan teknis dan memungkinkan proses pengesahan anggaran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat waktu.

Keempat, **komitmen politik yang kuat** dari semua pihak terkait, baik legislatif maupun eksekutif, untuk menyelesaikan pengesahan anggaran dengan tepat waktu juga menjadi faktor penting. Dengan adanya pemahaman yang sama mengenai pentingnya pengesahan anggaran tepat waktu untuk mendukung kelancaran pemerintahan dan pelayanan publik, seluruh pihak berkomitmen untuk menjaga agar proses ini dapat diselesaikan tanpa hambatan.

Dengan demikian, keberhasilan ini merupakan hasil dari kombinasi perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, pemanfaatan sistem yang efisien, serta komitmen politik yang

kuat, yang semuanya berkontribusi pada tercapainya pengesahan anggaran tepat waktu secara konsisten.

Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi kinerja dalam pengesahan anggaran tepat waktu, Sekretariat DPRD perlu melaksanakan sejumlah upaya strategis yang berfokus pada penguatan sistem, perbaikan proses, dan pengembangan kapasitas. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:

1. **Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Waktu**

Meskipun pengesahan anggaran tepat waktu telah tercapai, penting untuk terus memperbaiki proses perencanaan agar lebih efisien. Sekretariat DPRD dapat melakukan evaluasi terhadap proses yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi potensi perbaikan. Salah satunya adalah dengan merumuskan timeline yang lebih terperinci dan mempertimbangkan kemungkinan kendala yang dapat muncul, seperti perubahan kebijakan atau urgensi anggaran. Selain itu, penyesuaian target waktu dengan realitas yang ada akan memastikan tidak ada tahapan yang terburu-buru dan semua pihak dapat memberikan kontribusi maksimal.

2. **Optimalisasi Teknologi dan Sistem Informasi**

Penggunaan teknologi dalam pengelolaan anggaran dapat lebih ditingkatkan untuk mempercepat dan mempermudah proses pengesahan. Sekretariat DPRD bisa mempertimbangkan untuk mengembangkan sistem berbasis digital yang lebih canggih, yang tidak hanya memfasilitasi komunikasi antar pihak, tetapi juga memungkinkan pelacakan status setiap tahapan pengesahan anggaran secara real-time. Dengan adanya sistem yang lebih efisien

dan terintegrasi, hambatan teknis dapat diminimalkan, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat.

3. **Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki pengetahuan yang memadai sangat berperan dalam kelancaran proses pengesahan anggaran. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD harus terus mengadakan pelatihan dan workshop bagi staf yang terlibat dalam pengelolaan anggaran. Peningkatan kapasitas dalam hal pemahaman anggaran, pengelolaan dokumen, serta keterampilan komunikasi akan mempercepat proses administrasi dan pembahasan anggaran.

4. **Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi dengan Eksekutif dan Stakeholder Lainnya**

Koordinasi yang baik antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lainnya adalah faktor penting dalam pengesahan anggaran tepat waktu. Sekretariat DPRD perlu terus memperkuat komunikasi antar lembaga, dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses pengesahan anggaran memiliki pemahaman yang sama dan bekerja menuju tujuan yang sama. Pembentukan forum komunikasi rutin atau rapat koordinasi antara eksekutif dan legislatif dapat meningkatkan kerjasama dan mengurangi potensi keterlambatan akibat ketidaksepahaman atau kurangnya informasi.

5. **Evaluasi dan Pengawasan Berkelanjutan**

Untuk memastikan proses pengesahan anggaran tetap berjalan lancar, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap setiap tahapan pengesahan anggaran. Evaluasi ini dapat

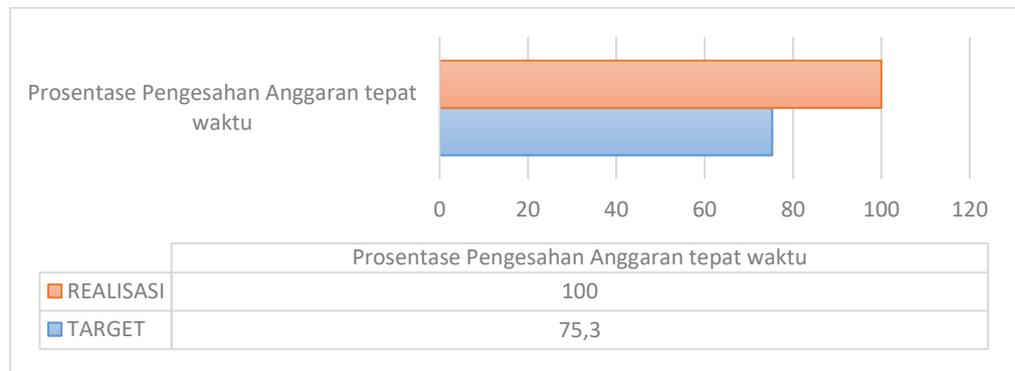
mencakup identifikasi kendala yang muncul, analisis waktu yang dibutuhkan di setiap langkah, serta umpan balik dari pihak terkait. Dengan adanya pengawasan yang berkelanjutan, Sekretariat DPRD dapat segera melakukan perbaikan dan penyesuaian guna mencegah terjadinya keterlambatan.

Dengan melaksanakan upaya-upaya tersebut, Sekretariat DPRD tidak hanya dapat mempertahankan pencapaian 100% dalam pengesahan anggaran tepat waktu, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas dalam seluruh proses pengelolaan anggaran di masa mendatang. Keberlanjutan dan perbaikan ini akan memberikan dampak positif bagi kelancaran operasional pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.

3. Analisis Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu

Perhitungan IKU untuk “Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu” dilakukan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Grafik 2. 7
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
"Prosentase Pengesahan Anggaran Tepat Waktu" Tahun 2024



Sumber data: Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

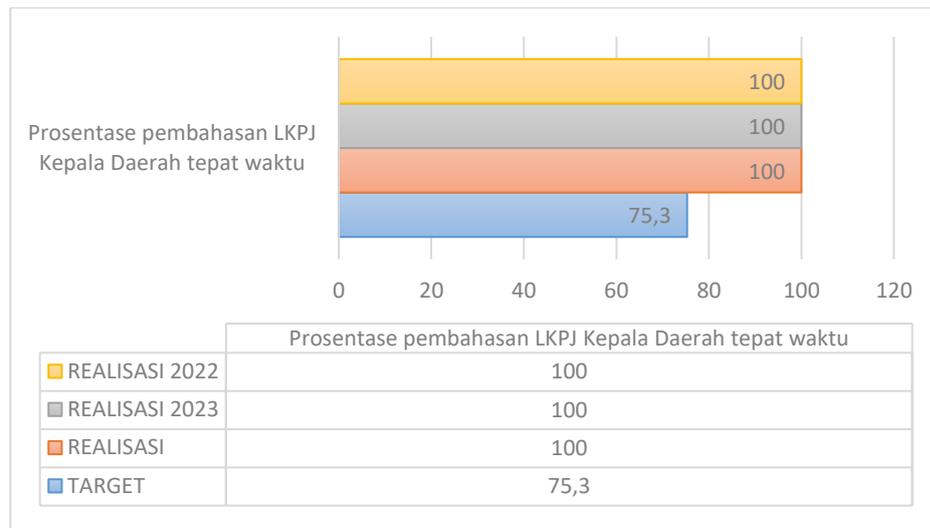
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD" yang didukung oleh indikator kinerja sasaran pertama yaitu "Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu" telah tercapai di atas target yang telah ditetapkan dengan capaian nilai yang diperoleh sebesar 100 dari target 75.30 atau bila di persentasekan mencapai 132.80%.

Nilai capaian yang di peroleh dari indikator "Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu" diperoleh melalui hasil realisasi pengesahan LKPJ Kepala Daerah di Tahun 2024, yang difasilitasi oleh Bagian Fasilitasi Pengawasan Penganggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang diuraikan sebagai berikut:

Dengan melihat Chart 2.6 tersebut diatas bahwa target tahun 2024 sebesar 75.30%, sementara realisasi 100% sudah mencapai target maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator kinerja Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2024 sebesar 132.80%.

Untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran di Tahun 2024 dengan capaian indikator sasaran Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 2. 8
Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian
"Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tepat Waktu"
Tahun 2024, Tahun 2023, dan Tahun 2022



Sumber data: Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Chart di atas menunjukkan perbandingan capaian indikator kinerja pada Sasaran Kedua, yaitu "Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD," dengan fokus pada indikator "Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tepat Waktu." Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa Sekretariat DPRD berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 100% pada tahun 2022, 2023, dan 2024, yang melebihi target yang ditetapkan sebesar 75.3%.

Keberhasilan ini mencerminkan adanya pengelolaan waktu yang baik, koordinasi yang solid antara eksekutif dan legislatif, serta komitmen yang tinggi dalam memastikan pembahasan LKPJ

(Laporan Kinerja Pemerintah Daerah) Kepala Daerah dilaksanakan tepat waktu. Proses pembahasan yang tepat waktu sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, sehingga pencapaian ini menunjukkan efektivitas Sekretariat DPRD dalam mendukung proses evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini di masa mendatang, penting untuk terus memastikan bahwa proses pembahasan LKPJ dilakukan secara efisien, dengan pengelolaan waktu yang lebih baik dan koordinasi yang lebih intensif antara semua pihak terkait. Selain itu, evaluasi berkala dan peningkatan kapasitas SDM akan membantu menjaga kualitas pembahasan dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

4. Nilai AKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya (LAN, 2003:26).

Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah pemerintah, bergantung pada penerima layanan. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara pemerintah dalam hal ini Sekretariat DPRD sebagai fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas DPRD untuk memberikan pelayanan yang baik dan bertanggung jawab kepada seluruh anggota DPRD Kota Bekasi. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel sesuai yang di amanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk itu Sekretariat DPRD menuangkannya dalam sebuah sasaran yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel” dengan indikator sasaran yaitu “Nilai AKIP Perangkat Daerah”.

Perhitungan nilai AKIP sebagai berikut: Nilai Komponen Perencanaan Kinerja + Nilai Komponen Pengukuran Kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja _ Nilai Komponen Evaluasi Internal + Nilai Komponen Capaian Kinerja Target.

Adapun capaian kinerja sasaran diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 6
Pencapaian Kinerja AKIP Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024 (%)	Ket
1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	77.70	69.62	89.60	

Sumber data Bagian Program dan Keuangan Setwan Kota Bekasi

Dari tabel diatas, terlihat bahwa hasil pengukuran kinerja sasaran "Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel" memperoleh nilai realisasi sebesar 69,62 dari nilai target 77,70, atau bila di persentasekan mencapai 89,60%.

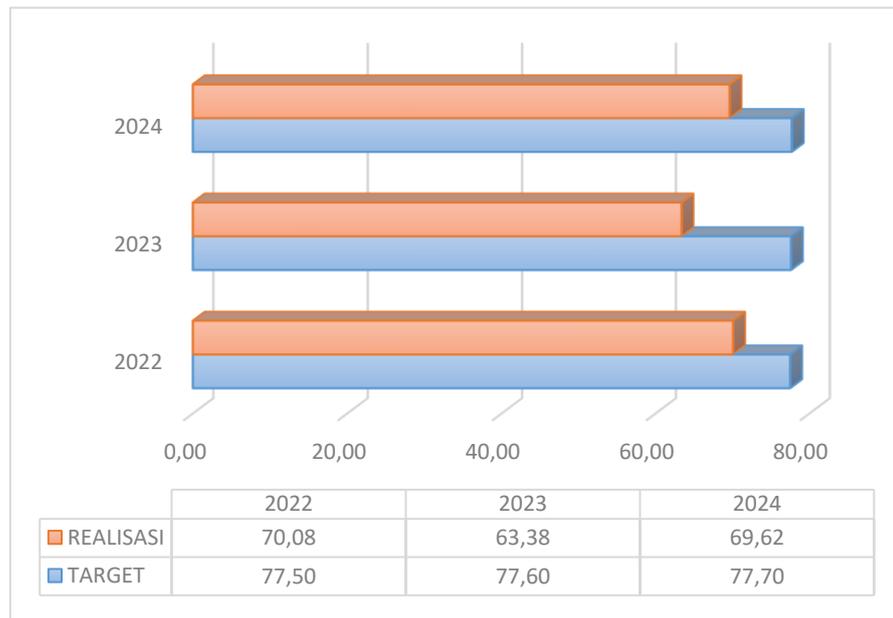
Tabel 2. 7
Penilaian Komponen AKIP Perangkat Daerah

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	21.70
2	Pengukuran Kinerja	30	21.19
3	Pelaporan Kinerja	15	10.14
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16.59
Nilai Hasil Evaluasi		100	69.62
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Sumber data Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Komponen dalam pengukuran indikator sasaran "Nilai AKIP Perangkat Daerah" terdiri atas 4 (empat) komponen, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Adapun hasil pengukuran dari ke 4 (empat) komponen tersebut dijabarkan pada tabel 2.7.

Grafik 2. 9
Perbandingan Antara Realisasi "Nilai AKIP Perangkat Daerah"
Tahun 2024, Tahun 2023, dan Tahun 2022



Sumber data Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Capaian nilai indikator sasaran "Nilai AKIP Perangkat Daerah" bila dilihat dari nilai realisasi kinerja dari tahun ke-tahun. Nilai pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun bila melihat target pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 nilai realisasi kinerja yang diperoleh belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 Nilai AKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi terdapat selisih nilai sebesar 8,08 dari target yang telah ditetapkan, seperti dapat dilihat pada chart di bawah ini.

Adapun penyebab belum tercapainya nilai indikator sasaran "Nilai AKIP Perangkat Daerah" ialah disebabkan dikarenakan masih terdapat catatan dan perbaikan dari pemenuhan eviden dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja Sekretariat DPRD di Tahun 2024.

Namun demikian, kenaikan kinerja AKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada tahun 2024 dibandingkan pada tahun 2023 disebabkan oleh beragam faktor baik dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, maupun Evaluasi akuntabilitas kinerja internal seperti tampak pada Tabel 2.5, diantaranya adalah :

a) Perencanaan kinerja

Nilai perencanaan kinerja pada hasil evaluasi adalah 21.70 dari bobot 30. Dibutuhkan penyempurnaan pada dokumen perencanaan untuk memenuhi standar dokumen perencanaan yang baik dan selaras antara dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah, serta pedoman yang telah dilegalisasi sebagai dasar perencanaan kinerja.

b) Pengukuran kinerja

Nilai pengukuran kinerja pada hasil evaluasi adalah 21.19 dari bobot 30. Dibutuhkan pengukuran kinerja yang sesuai dengan aturan yang berlaku, serta pedoman yang telah dilegalisasi sebagai dasar pengumpulan bahan pengukuran kinerja.

c) Pelaporan kinerja

Nilai pelaporan kinerja pada hasil evaluasi adalah 10.14 dari bobot 15. Pelaporan kinerja dibutuhkan penyempurnaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memperoleh pelaporan kinerja perangkat daerah yang baik dan akuntabel.

d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah 16.59 dari bobot 25. Pada dokumen pendukung telah dilakukan evaluasi secara berkala sebagai upaya mencapai target indikator tujuan dan sasaran pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Hasil evaluasi terhadap AKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 diketahui terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perbaikan, yaitu :

- a) Perencanaan kinerja agar dijaga konsistensi penyebutan indikator sasaran pada rencana strategis dan rencana Kerja.
- b) Pengukuran kinerja agar dalam penyusunan Renstra diformalkan dengan penanggalan, serta menjaga keselarasan dan konsistensi antara rencana strategis dan rencana Kerja terutama pada uraian program, indikator program dan sub kegiatan.
- c) Pelaporan kinerja agar memiliki SOP Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja yang telah diformalkan agar menjadi pedoman penyusunan laporan kinerja, serta menampilkan analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya pada LKIP.
- d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal perlu diperbaiki terutama pada bukti pendukung terhadap realisasi kinerja yang tidak mencapai target.

Beberapa upaya yang akan dilakukan di tahun 2024 untuk meningkatkan capaian indikator sasaran "Nilai AKIP Perangkat Daerah" adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyelarasan dokumen perencanaan yang berorientasi dengan hasil kinerja;
- b) Melaksanakan pengukuran kinerja yang berjenjang melalui rapat evaluasi internal pada tiap akhir triwulan;
- c) Memanfaatkan dokumen perencanaan sebagai *feedback* hasil kinerja pada Tahun Anggaran berjalan.

2.2.2 Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 s/d Triwulan II

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 melaksanakan 2 (dua) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) Sub Kegiatan. Adapun dengan anggaran setelah efisiensi sebesar Rp. 232.840.644.843,- (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

Capaian kinerja yang telah dicapai Sekretariat DPRD Kota Bekasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 serta perjanjian kinerja Sekretaris DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 sebanyak 4 (empat) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut adalah Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu, Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu, Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu, dan Nilai AKIP Perangkat Daerah.

Analisis kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi berupa kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya. Pada Tahun 2025, Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti tampak pada tabel di bawah:

Tabel 2.8
Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025
Terhadap Indikator Kinerja Utama

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu	75.40%	10%	-

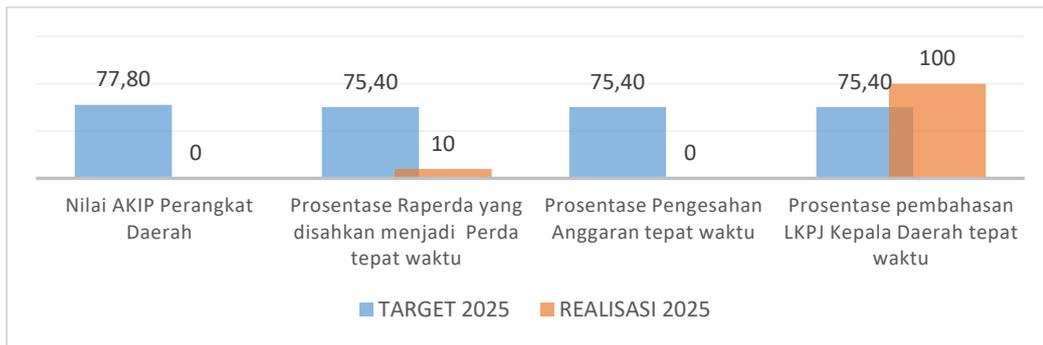
NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
		Prosentase Pengesahan Anggaran	75.40%	(belum dapat dihitung)	-
		Prosentase Pembahasan LPKJ	75.40%	100%	132.63%
2.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	77.80	Nilai Belum Keluar	-

Sumber: Data diolah Bagian Program dan Perencanaan, Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari keempat indikator kinerja utama yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah terdapat progress capaian kinerja khususnya pada indikator kinerja Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi perda tepat waktu dan Prosentase Pengesahan Anggaran.

Grafik 2. 10

Realisasi Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025



Sumber: Data diolah Bagian Program dan Perencanaan, Tahun 2025

1. Capaian indikator sasaran Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda sebesar 10% dengan tersusunnya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu sudah dilakukan beberapa pembahasan diantaranya: pembahasan raperda tentang RPJMD Kota Bekasi 2024-2029, Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Kota Bekasi tentang Pengelolaan Sampah dan Pembahasan Perubahan Raperda tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Capaian indikator Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu belum dapat dihitung dikarenakan jadwal kegiatan terdapat pada Triwulan III Tahun 2025, sehingga belum dilakukan pembahasan terkait anggaran.
3. Capaian indikator Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu sebesar 100%. Sesuai dengan rencana tersusun 1 laporan Dokumen Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah di Bulan April sampai dengan Juni 2025
4. Capaian indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah masih belum dapat dihitung karena belum dilakukan penilaian terhadap Sakip, sehingga belum terdapat nilai AKIP.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

1. Sekretariat DPRD Kota Bekasi sampai dengan triwulan II Tahun 2025 telah melakukan pelayanan terhadap DPRD Kota Bekasi melalui 2 (dua) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) Sub Kegiatan. Pada subbab sebelumnya dijelaskan rata-rata capaian kinerja kegiatan adalah 35,27% dengan serapan anggaran Rp. 66.310.340.089,00,- (Enam Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribuan Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
2. Dalam pelayanannya Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki permasalahan dan hambatan. Identifikasi permasalahan dan hambatan Sekretariat DPRD didalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pencapaian IKU maupun IKK antara lain:
 - a. Kualitas Layanan yang Tidak Konsisten.
Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD menunjukkan fluktuasi, yang mengindikasikan adanya masalah dalam konsistensi layanan.

- b. Tidak tercapainya target Pengesahan Raperda menjadi Perda.
Prosentase Raperda yang disahkan tepat waktu masih di bawah target, menunjukkan adanya kendala dalam proses legislasi.
 - c. Agenda DPRD yang dinamis.
Fasilitasi dan dukungan pelaksanaan tugas Anggota DPRD menjadi terkendala dikarenakan sering terjadi perubahan jadwal pembahasan dari agenda yang telah ditetapkan.
 - d. Keterlambatan dalam Pembahasan LKPJ.
Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu menunjukkan adanya masalah dalam koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah.
 - e. Nilai AKIP yang tidak mencapai target.
Nilai AKIP Perangkat Daerah menunjukkan angka yang tidak memuaskan, mencerminkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan.
3. Permasalahan dan hambatan tersebut diatas tentunya akan berpengaruh kepada pencapaian tujuan organisasi yang tertuang pada IKU (Indikator Kinerja Utama).
 4. Tantangan dan Peluang Sekretariat DPRD Kota Bekasi
Tantangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya Harapan Masyarakat:
Masyarakat mengharapkan layanan yang lebih baik dan transparan, yang menjadi tantangan bagi Sekretariat DPRD untuk memenuhi ekspektasi tersebut.
 - b. Sumber Daya Manusia yang Terbatas:
Keterbatasan jumlah dan kualitas SDM di Sekretariat DPRD dapat menghambat efektivitas pelayanan.
 - c. Kompleksitas Proses Legislasi:

Proses legislasi yang kompleks dan memerlukan banyak tahapan dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengesahan Raperda.

d. Perubahan Kebijakan yang Cepat:

Perubahan kebijakan yang cepat di tingkat nasional dan regional dapat menyulitkan perangkat daerah dalam menyesuaikan diri.

Selain tantangan-tantangan seperti diuraikan di atas, terdapat pula peluang-peluang yang mendukung terhadap pelaksanaan pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi yaitu:

a. Pemanfaatan Teknologi Informasi:

Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan.

b. Kerjasama dengan Stakeholder:

Membangun kerjasama dengan berbagai stakeholder dapat meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas.

c. Program Pelatihan untuk SDM:

Mengadakan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM di Sekretariat DPRD.

d. Inisiatif Partisipasi Masyarakat:

Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

e. Pengembangan Sistem Pelaporan yang Efektif:

Mengembangkan sistem pelaporan yang lebih efektif untuk memantau kinerja dan hasil program.

5. Sehubungan dengan hal tersebut, isu penting yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Bekasi antara lain:

a. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi.

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa pemerintah, lembaga, dan organisasi lainnya bertanggung jawab atas tindakan

dan keputusan mereka, serta memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik. Tujuan utamanya adalah membangun kepercayaan publik, mengurangi korupsi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya.

b. Penguatan Kapasitas SDM.

Memperkuat kapasitas SDM Sekretariat DPRD dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan. Didalam menjalankan perannya, Sekretariat DPRD menghadapi tuntutan untuk melaksanakan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada dengan cara seperti pelatihan, pendidikan, pengembangan karir, maupun peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Dengan peningkatan kapasitas SDM, diharapkan produktivitas kerja dapat meningkat dan meningkatkan kualitas pelayanan, mengatasi tantangan, membangun inovasi, meningkatkan daya saing bagi organisasi.

c. Optimalisasi Proses Legislasi.

Mengoptimalkan proses legislasi untuk memastikan pengesahan Raperda dan anggaran tepat waktu. Optimalisasi proses legislasi berkaitan erat dengan dengan efektivitas DPRD Kota Bekasi dan/atau fasilitasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam membuat pembentukan peraturan-peraturan, mulai dari proses pembahasan sampai dengan proses pengesahan belum optimal. Kepentingan politik, kualitas produk legislasi serta kemampuan SDM berpengaruh kepada optimalnya proses legislasi.

d. Optimalisasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan

Selain menyusun Peraturan Daerah terdapat dua fungsi lain yang harus dijalankan oleh DPRD Kota Bekasi, yaitu fungsi

penganggaran dan pengawasan. Fungsi penganggaran terkait dengan penyusunan dan pengesahan APBD dan APBDP Kota Bekasi termasuk, sedangkan fungsi pengawasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terdistribusi kepada perangkat daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan. Optimalisasi dukungan terhadap kedua fungsi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPRD Kota Bekasi.

e. Peingkatan Harmonisasi antara Eksekutif dan Legislatif.

Meningkatkan harmonisasi antara eksekutif dan legislatif untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program dan kebijakan. Hal ini sangat penting yaitu untuk memastikan agar pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien. Harmonisasi yang baik akan Meningkatkan kolaborasi yang kuat dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh caapaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

3.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional (Renja Tahun 2025)

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2025 mengacu dan memperhatikan : (1) RTRW Kota Bekasi 2009-2023; (2) Sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2025 dan (5) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan Tahun 2025.

Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap tujuan pembangunan Kota Bekasi periode Tahun 2024-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Mengacu kepada RPJMN 2024-2024, pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi Prioritas Nasional (PN) pada RKP 2025. Adapun Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024 yaitu : **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan

didukung oleh 7 (tujuh) Prioritas Nasional sebagai berikut: 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; 3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sehingga sasaran pembangunan tahun 2025 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya pondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

- 1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (1) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2025 ditetapkan 8 (delapan) arah kebijaksan pembangunan yaitu:

- 1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 2) Peningkatan kualitas dan penguatan riset terapan;
- 3) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- 4) Penguatan daya saing usaha;
- 5) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- 6) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas; dan
- 7) Percepatan pembangunan ibu kota nusantara.

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Periode perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa barat Tahun 2018-2023 telah berakhir seiring dengan selesainya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Provinsi Jawa Barat menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi

Tujuan merupakan kondisi yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan. Jika dalam RPJMD pencapaian tujuan diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, maka da;a, RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 ini diukur dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 didefinisikan sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator pembangunan yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.



Gambar 3. 1 Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang dijelaskan dalam Gambar 3.1. Tujuan dan sasaran diukur keberhasilannya melalui capaian indikator kinerja atau indikator pembangunan. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja yang dalam hal ini adalah sasaran dan tujuan dalam bentuk hasil (outcome), dampak(impact). Indikator kinerja di level hasil (outcome) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu atau dipertahankan pada penerima mandat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sedangkan indikator kinerja di level dampak (impact) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan didefinisikan sebagai kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan disusun untuk memberikan arah dan memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan selama rentang waktu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dari 2024 sampai dengan

2026. Pada saat yang sama arah kebijakan juga dirancang untuk menjadi payung bagi pencapaian prioritas pembangunan dalam RPD Kota Bekasi 2024-2026 pada aspek tata kelola pemerintahan, pembangunan manusia, keamanan dan ketertiban kota, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan ekonomi.

Untuk mendukung pemenuhan tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel arah kebijakan RPD 2024-2026 adalah Penguatan fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital.

Dalam rangka mendorong pencapaian tujuan Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan terdapat dua arah kebijakan pada RPD 2024-2026 yaitu Penguatan kualitas manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan merata dan Penguatan ketahanan keluarga dan mendorong kewirausahaan secara inklusif.

Sementara untuk mendukung pemenuhan tujuan Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dan tujuan Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib, arah kebijakan RPD 2024-2026 adalah Peningkatan ketahanan kota melalui penguatan kualitas pelayanan dasar infrastruktur dan lingkungan.

Sedangkan untuk mendukung pemenuhan tujuan Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota arah kebijakan RPD 2024-2026 adalah Peningkatan kekuatan dan kemantapan perekonomian kota melalui kemudahan berusaha di sektor jasa, perdagangan, industri dan usaha kecil alternatif berbasis ekonomi kerakyatan.

Secara lebih detail, strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam RKPD Kota Bekasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATORKINERJA (TUJUAN/IMPACT /OUTCOME)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi		1. Penguatan fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	1. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur pemerintah di bidang layanan masyarakat 2. Menerapkan teknologi/transformasi digital dalam menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat	
1.2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	1. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan berbasis bukti dan data yang saling terintegrasi	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	2. Penguatan, Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kerja sama antar daerah serta kolaborasi	
		Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)	3. Meningkatkan pengendalian proses pembangunan dan percepatan penyelesaian rekomendasi hasil audit	
		Presentase Peningkatan PAD	4. Meningkatkan pemetaan, pengembangan kompetensi, penilaian evaluasi kinerja, kesejahteraan dan promosi aparatur berbasis sistem secara transparan.	
2	Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan	Indeks Pembangunan Manusia		2. Penguatan kualitas manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan merata
2.1	Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi	Indeks Pendidikan	1. Meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan secara merata dan terjangkau seluruh kalangan	
			2. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh pihak guna peningkatan kualitas SDM siap berkompetisi	
2.2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	1. Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan masyarakat secara merata dan terjangkau seluruh masyarakat 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penyediaan lingkungan sehat	
		Gini Ratio		3. Penguatan ketahanan keluarga dan mendorong kewirausahaan secara inklusif
2.3	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Keluarga	1. Memfasilitasi pemberdayaan keluarga ber-Wirusaha dengan pendekatan kerjasama antar pihak pengandil	
		Indeks Pembangunan Gender	1. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan anak menjadi lebih berkualitas dan berdikari	

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT /OUTCOME)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak atas hak dasar serta dari kekerasan dan ancaman keselamatan	
2.4	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	Memperbanyak pelatihan kepada angkatan kerja lokal berbasis kolaborasi	
		Angka Kemiskinan	Menyelaraskan data pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dari berbagai sektor serta indikator penyebab	
3	Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah		4. Peningkatan ketahanan kota melalui penguatan kualitas pelayanan dasar infrastruktur dan lingkungan.
3.1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas jalan dan fasilitas pelengkap guna pemenuhan aksesibilitas dan mobilitas kendaraan 2. Melakukan pengembangan jalur trotoar dan pedestrian sebagai fasilitas pejalan kaki yang layak dan nyaman serta guna aktivitas sosial masyarakat 3. Melakukan pengurangan dampak banjir dengan merestorasi sistem drainase dan sungai melalui upaya kerjasama antar daerah dan pemerintah pusat	
		Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan angkutan umum, halte, terminal dan fasilitas parkir serta perlengkapan jalan 2. Merumuskan dan memberikan rekomendasi kebijakan dalam upaya mendorong pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dan beralih kepada penggunaan angkutan umum-massal berbasis bus	
		Indeks Permukiman Pertanahan	1. Meningkatkan akses dan kapasitas layanan air minum aman secara berkeadilan 2. Meningkatkan akses dan kapasitas layanan pengolahan air limbah domestik dan kualitas layanan sanitasi 3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas permukiman yang layak huni, bebas kumuh melalui peran partisipasi masyarakat dan berkelanjutan	
		Indeks Penataan Ruang	1. Meningkatkan kualitas dan evaluasi penataan serta pemanfaatan ruang dengan memperhatikan aspek lingkungan hijau, keberlanjutan dan ketahanan kota atas resiko bencana dan pencemaran 2. Meningkatkan kualitas penataan kota dengan optimalisasi terwujudnya sistem pusat layanan yang berorientasi transit dan ketersediaan ruang publik kota	

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT /OUTCOME)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan upaya penurunan dan penanggulangan beban pencemaran lingkungan 2. Meningkatkan upaya penurunan dampak limbah non domestik dan limbah B3 melalui pendekatan partisipasi dan kolaborasi 3. Meningkatkan kapasitas ruang terbuka hijau kota dan optimalisasi penghijauan di kawasan perumahan permukiman guna upaya penurunan temperatur kota 4. Menigoptimalkan kapasitas dan kualitas pelayanan persampahan dengan mendorong kerjasama antar daerah, pihak swasta dan masyarakat	
4	Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum		
4.1	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum	1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat dalam hal upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum 2. Mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan tindak pelanggaran keamanan dan ketertiban melalui deteksi dini dan pengawasan berbasis digital	
		Prosentase Kerjasama Antar Kelompok Sara	Memfasilitasi ruang kerjasama dan komunikasi antar kelompok	
		Indeks Risiko Bencana		
4.2	Meningkatnya Upaya dan Kesiapsiagaan Dalam Mengurangi Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana serta kesiapsiagaan SDM penanggulangan bencana	
		Indeks Penanggulangan Kebakaran	2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana	
5	Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi		5. Peningkatan kekuatan dan kemandirian perekonomian kota melalui kemudahan berusaha di sektor jasa, perdagangan, industri dan usaha kecil alternatif berbasis ekonomi kerakyatan
5.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa	1. Memberikan permodalan melalui dana bergulir atau pelatihan bagi koperasi dan UKM dengan mendorong peran organisasi non pemerintah 2. Membuka ruang, fasilitas, dan kemudahan pemasaran berbasis kolaborasi	
			3. Meningkatkan sektor kepariwisataan perkotaan serta pelestarian kesenian lokal dan situs bersejarah	
		Persentase Peningkatan Nilai Sektor Industri	Memfasilitasi sertifikasi bagi Industri Kecil dan Menengah	
		Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	Mengembangkan promosi penanaman modal	
5.2		Peningkatan Pengeluaran Perkapita	Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan sektor-sektor alternatif	

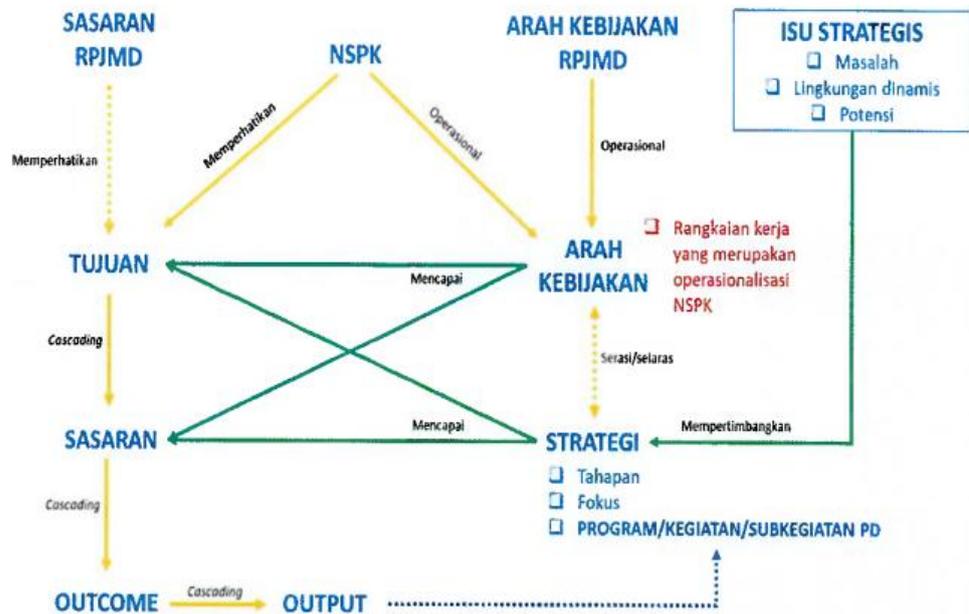
NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT /OUTCOME)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Laju Inflasi	Menjaga stabilitas harga komoditas melalui intervensi di sektor distribusi dan upaya kemandirian pangan masyarakat	

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

3.1.2 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional (Perubahan Renja Tahun 2025)

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada periode tahun 2025-2029. NSPK yang diterapkan merupakan acuan utama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai dasar dalam menjalankan berbagai kebijakan, program, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Gambar 3. 2
Konsep Renstra PD

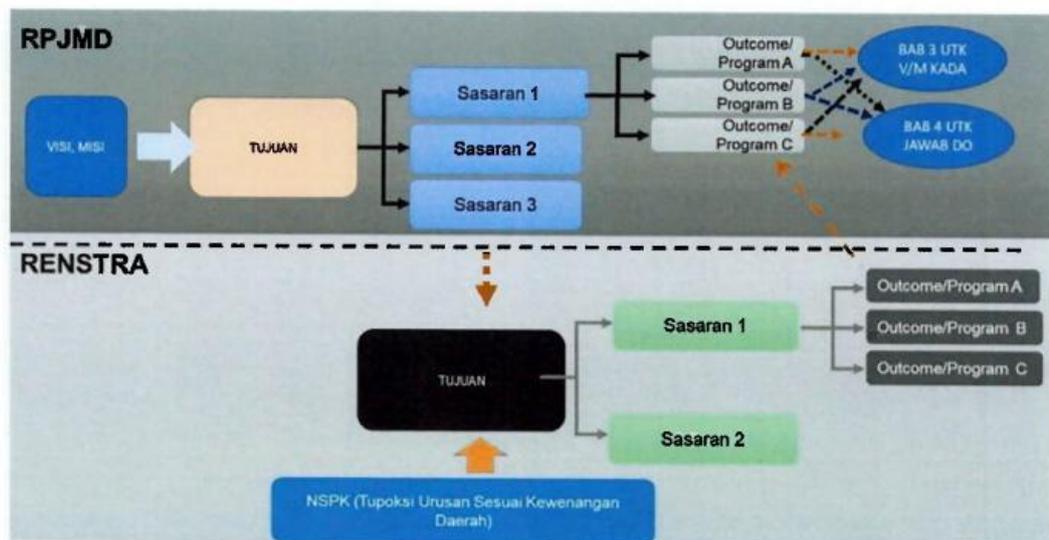


Sumber: Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Dalam rangka mendukung visi misi Pemerintah Kota Bekasi serta selaras dengan arah pembangunan Jawa Barat 2025-2029 dan implementasi Asta Cita 2025-2029 pada tingkat nasional, Sekretariat DPRD Kota Bekasi wajib mengikuti dan mengimplementasikan NSPK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap proses administratif, pengelolaan dokumen, pelaksanaan anggaran, serta pelayanan publik terlaksana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Gambar 3. 3

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Sumber: Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

A. UU 23 Tahun 2014/ PP 18 Tahun 2016

Sebagaimana telah diamanatkan pada Paragraf 7 Pasal 162 ayat (10) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Demikian juga pada Paragraf 2 Pasal 31 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyelenggarakan:

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten/kota;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten/kota;
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota; dan
4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota.

B. Asta Cita

Asta Cita merupakan visi-misi pembangunan nasional untuk periode tahun 2025-2029 yang diusung oleh pemerintah pusat sebagai pedoman strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Asta Cita mengandung Visi yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, dan delapan misi utama yang mengarahkan pembangunan nasional ke arah yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Gambar 3. 4

Visi Kabinet Merah Putih

Bersama	Prabowo dan Gibran mengajak Putra Putri Terbaik Bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama
Indonesia Maju	Membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo
Menuju	Dengan tujuan yang jelas, yaitu
Indonesia Emas	Negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat

Gambar 3. 5
8 (delapan) Misi Utama Asta Cita

1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HÁ	5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.	7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mengoptimalkan implementasi Asta Cita, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi dengan visi dan misi pembangunan di tingkat provinsi maupun daerah.

C. Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan visi dan misi sebagai pedoman

strategis pembangunan daerah untuk periode 2025-2029. Visi dan misi ini dirumuskan dengan memperhatikan dinamika sosial, ekonomi, budaya, serta kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang beragam dan dinamis. Melalui visi dan misi tersebut, Jawa Barat berkomitmen untuk menjadi provinsi yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan, yang mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia, mengembangkan ekonomi yang adil, serta melestarikan lingkungan hidup demi kesejahteraan seluruh warga.

Visi dari Provinsi Jawa Barat yaitu Jabar Istimewa, yaitu situasi atau kondisi dimana penyelenggara pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Gubernur **berkeinginan/ berkomitmen untuk mengistimewakan masyarakat**, baik Istimewa dalam memberikan pelayanan, maupun istimewa dalam pelaksanaan pembangunan. Visi Jabar Istimewa ini didukung dengan 4 (empat) misi yaitu:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkarakter;
2. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif;
3. Menjaga keseimbangan Disparitas Pembangunan Utara-Selatan, Miskin dan Kaya, serta Perkotaan dan Pedesaan;
4. Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, berorientasi pelayanan, dan sesuai dengan prinsip *Good and Clean Governance*.

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi menyelaraskan visi dan misi daerahnya dengan visi dan misi provinsi guna menjamin keselarasan pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan Jawa Barat secara menyeluruh.

D. Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Visi yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, sasaran visi, dan sasaran pokok RPJPD. Visi ini menjadi titik sentral bagi segala daya dan upaya yang akan diarahkan ke depannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi. Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”

Visi ini memiliki kandungan makna bahwa “Kota Bekasi yang Semakin Nyaman dan Sejahtera”. Kata “yang Semakin” menunjukkan semangat pembaruan untuk menjadikan kondisi Kota Bekasi yang lebih maju dari kondisi sebelumnya. Apa yang sudah baik, dilanjutkan. Apa yang tidak baik, dihilangkan. Apa yang masih kurang, diperbaiki. Apa yang masih belum tertangani, dilengkapi. Apa yang belum sempurna, disempurnakan. Hal ini tentunya sejalan dengan tahap pertama RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 yang menekankan pada penguatan modalitas atau sumber daya yang dimiliki oleh Kota Bekasi.

Kata “Nyaman” menunjukkan gambaran keadaan yang kondusif kehidupan perkotaannya, aman terlindungi bagi warganya, asri suasana lingkungan kotanya, tenang beraktivitas kesehariannya, terjamin bebas dalam berekspresi, dan guyub rukun saling menghargai dalam kehidupan beragama dan kebudayanya di Kota Bekasi.

Kata “Sejahtera” menunjukkan gambaran kondisi dan taraf kehidupan warga kotanya yang baik, dalam arti cukup “sandang, pangan, dan papan” serta sehat, cerdas, dan berpendapatan yang layak untuk menghidupi diri dan keluarganya.

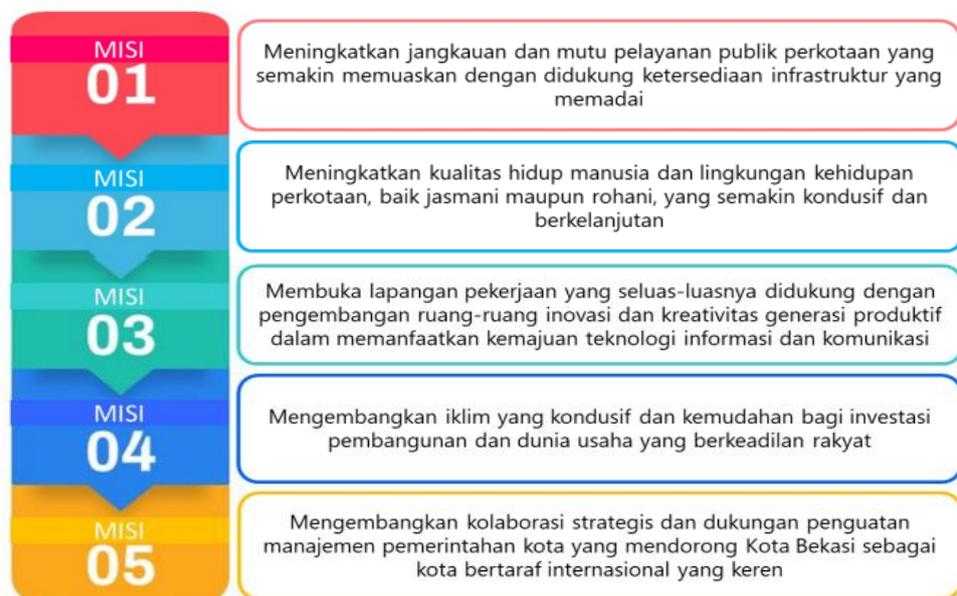
Dalam rumusan dan penjelasan visi di atas, dijiwai dan disemangati dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut antara lain berke-Tuhan-an, berwawasan kebangsaan, berkeadilan rakyat, kebersamaan (gotong royong), keterbukaan, inovatif dan kreatif.



Sumber: Naskah Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, 2025 (diolah)

E. Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029

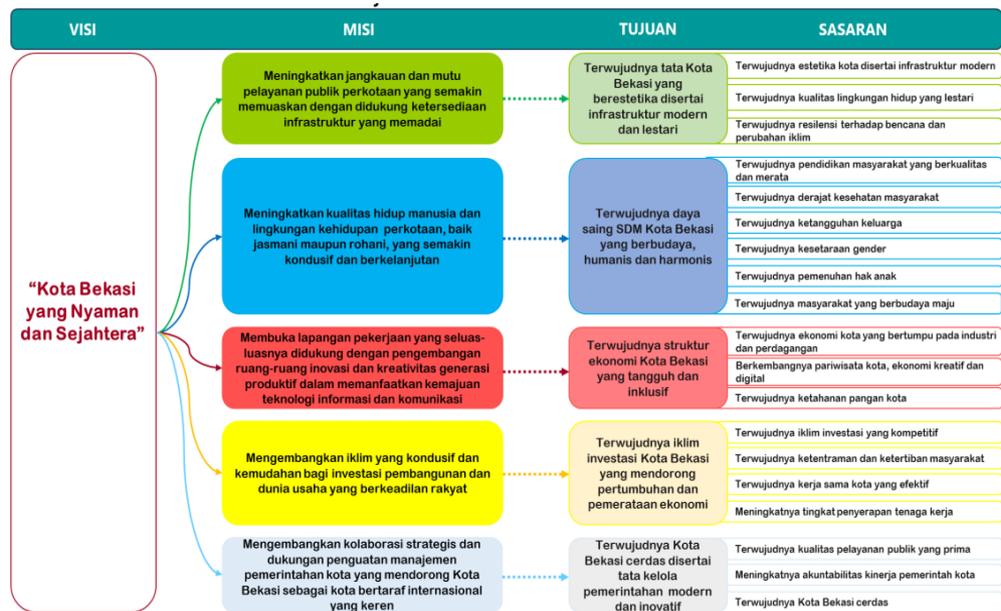
Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bekasi di atas, rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kota Bekasi terangkum dalam 5 (lima) misi. Ke-5 (lima) misi tersebut, seperti pada gambar di bawah ini.



Sumber: Naskah Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, 2025 (diolah)

F. Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan Pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.



Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

G. Tujuan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan selama periode lima tahun. RPJMD berfungsi untuk mengarahkan dan menyelaraskan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, termasuk Sekretariat DPRD, dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah.

Dari data di atas, keterkaitan antara Sekretariat DPRD Kota Bekasi dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi yang tertuang di dalam RPJMD Kota Bekasi adalah:

Visi : Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera

Misi : Misi ke 5 (lima), yaitu Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren.

Tujuan : Tujuan ke 5 (lima), yaitu Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata Kelola pemerintahan modern yang inovatif.

Sasaran : Sasaran ke-17 (tujuh belas) yaitu “Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima” dan Sasaran ke-18 (delapan belas) yaitu “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota”.

Dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, Sekretariat DPRD Kota Bekasi berkomitmen untuk menyusun rencana strategis yang berlandaskan pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. IKK ini menjadi acuan penting dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang akan diambil selama periode 2025-2029, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Tabel 3. 2
Tujuan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

TUJUAN	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
INDIKATOR	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

Sumber data: Bagian Program dan Keuangan (diolah)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil. Tujuan pada Renja ini adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2025. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan, maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025

Sesuai dengan tugas pokoknya, Sekretariat DPRD mendukung pencapaian pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Perencanaan Pembangunan dan Keuangan yang Sehat, Tranparan dan Akuntabel”. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah tersebut, maka Sekretariat DPRD merumuskan Tujuan sebagai berikut.

Tujuan	: Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan.
Indikator Tujuan	: Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya

tujuan, berupa hasil kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis Perangkat Daerah bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD maka Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mendukung Tujuan terdiri dari:

Sasaran 1	: Meningkatkan Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD
Indikator Sasaran 1	: Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu
Indikator Sasaran 2	: Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu
Indikator Sasaran 3	: Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu

Adapun Sasaran 2 dalam mendukung tercapainya Tujuan adalah:

Sasaran 2	: Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel
Indikator Sasaran	: Nilai AKIP Perangkat Daerah

Tabel 3. 3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Bekasi

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	IKU	Target Kinerja Sasaran		
							2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan fasilitasi kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD	Meningkatkannya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Persentase raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perda yang disahkan}}{\text{Raperda yang diusulkan}} \times 100\%$	Persen (%)	75,3	75,4	75,5
				Persentase pengesahan anggaran tepat waktu	$\frac{\text{Perda dan Perkada APBD/LP2APBD yang disahkan}}{100\%} \times$ $\frac{\text{Perda dan Perkada APBD yang disahkan tepat waktu}}{\text{Perda dan Perkada APBD yang disahkan tepat waktu}}$	Persen (%)	75,3	75,4	75,5
				Persentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	$\frac{\text{LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah}}{\text{LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah}} \times 100\%$ $\frac{\text{LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah}}{\text{LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah}}$	Persen (%)	75,3	75,4	75,5
			Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP = Nilai komponen perencanaan kinerja + Nilai komponen pengukuran kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja + Komponen Evaluasi Internal + Nilai Komponen Capaian Kinerja	Nilai	77,7	77,8	77,9

Sumber : Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi 2024-2026

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi secara optimal, Sekretariat DPRD menetapkan tujuan untuk mewujudkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara efektif dan efisien. Tujuan ini menjadi landasan bagi seluruh program dan kegiatan yang dirancang dalam rencana kerja perubahan 2025.

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, Sekretariat DPRD menggunakan tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan yang diberikan sebagai ukuran utama. Indikator ini mencerminkan sejauh mana Sekretariat mampu memberikan layanan yang responsif, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan anggota DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislatif, penganggaran, dan pengawasan.

Untuk mencapai tujuan dan indikator tersebut, telah ditetapkan beberapa sasaran strategis yang menjadi fokus pengembangan dan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD, yaitu:

Tabel 3. 4
Sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya Efektivitas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD
	Terpenuhinya Fasilitasi Proses Legislasi dan Kajian Hukum DPRD
	Optimalisasi Dukungan Penganggaran dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Sumber data: Bagian Program dan Keuangan (diolah)

Keterkaitan yang erat antara tujuan, indikator, dan sasaran ini menciptakan kerangka kerja yang sinergis bagi Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam menyusun dan melaksanakan rencana strategisnya. Dengan mengedepankan tingkat kepuasan anggota DPRD sebagai indikator kunci, seluruh sasaran yang telah ditetapkan diarahkan untuk menghasilkan pelayanan yang profesional dan mendukung ketercapaian tujuan utama. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat peran Sekretariat DPRD sebagai unit pendukung yang handal dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tabel 3. 5
Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja 2025
Sekretariat DPRD Kota Bekasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya Efektivitas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	70	70.50	71	71.50	72	72.50	Nilai
		Terpenuhinya Fasilitasi Proses Legislasi dan Kajian Hukum DPRD	Persentase Fasilitasi pembahasan Raperda menjadi Perda tahun N	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen (%)
		Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
		Optimalisasi Dukungan Penganggaran dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen (%)

Dalam upaya meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD, kami telah menetapkan beberapa sasaran yang terukur dan relevan. Setiap sasaran ini akan dievaluasi menggunakan indikator yang telah ditentukan, yang akan memberikan gambaran jelas tentang pencapaian kinerja. Berikut adalah penjelasan mengenai indikator dan rumus pengukurannya:

1. Nilai AKIP Sekretariat DPRD

AA (Bobot nilai 100)	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A (Bobot nilai 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut
BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan
B (Bobot nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%)
CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%)
C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi
D (Bobot nilai 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%)
E (Bobot nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Sumber data PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021

2. **Persentase Fasilitasi Pembahasan Raperda menjadi Perda Tahun N**

Untuk mengukur nilai persentase dalam fasilitasi pembahasan Raperda menjadi Raperda tahun N, dihitung dengan rumus:

Persentase fasilitasi pembahasan Raperda = (Jumlah pembahasan Raperda yang terfasilitasi ÷ Jumlah permohonan pembahasan Raperda) × 100%

3. **Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N**

Dalam rangka memastikan bahwa Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan tepat waktu, kami mengukur ketepatan penetapan Perda dengan rumus:

Ketepatan Penetapan Perda = Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu

4. **Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, kami menggunakan indikator persentase fasilitasi pengawasan, yang dihitung dengan rumus:

Persentase fasilitasi pengawasan = (Pengawasan dilaksanakan ÷ Pengawasan direncanakan) × 100 %

3.3 Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Dalam rangka mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi periode 2025-2029, Sekretariat DPRD Kota Bekasi menyusun program-program strategis yang berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yang menekankan pada efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program-program ini dirancang untuk menjawab tantangan dan peluang yang dihadapi, serta selaras dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi dan strategi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025, Sekretariat DPRD Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) Program, yang terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan. Pada Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) Program, yang terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan dan usulan penambahan 3 sub kegiatan baru sehingga total sub kegiatan menjadi 60 (enam puluh) sub kegiatan. Adapun terdapat perubahan dari pagu anggaran dari anggaran sebesar Rp. 237.879.282.132,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah) menjadi Rp. 207.938.555.463 (Dua Ratus Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

Secara rinci berikut adalah perubahan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 serta perkiraan maju Tahun 2026:

Tabel 3. 6

**Tabel T-C.33 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan
Serketariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026**

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				100%	111.480.241.704	110.431.300.324			100%	111.816.658.562
	Outcome : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		-	98%	80.000.000	80.000.000			98%	80.000.000
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK		-	7 Dok	80.000.000	80.000.000			7 Dok	80.000.000
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	12 Dok	3 Dok	40.000.000	40.000.000	-	-	3 Dok	40.000.000
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	3 Lap	4 Lap	40.000.000	40.000.000	-	-	4 Lap	40.000.000

RANCANGAN AKHIR RENJA PERUBAHAN | 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		-	88%	15.063.367.000	15.675.969.554			88%	16.402.446.000
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK		-	18 Lap	15.063.367.000	15.675.969.554			18 Lap	16.402.446.000
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	2.086 Org/Bln	2.086 Org/Bln	14.999.367.000	15.611.969.554	-	-	2.086 Org/Bln	16.338.446.000
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	2 Lap	2 Lap	40.000.000	40.000.000	-	-	2 Lap	40.000.000
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanam/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanam/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanam/ Semesteran SKPD	Kota Bekasi	15 Lap	15 Lap	24.000.000	24.000.000	-	-	15 Lap	24.000.000
	Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		-	86.2%	951.170.000	951.170.000			86.2%	951.170.000
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun sesuai NSPK		-	2 Lap	951.170.000	951.170.000			2 Lap	951.170.000
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	52 Org	52 Org	379.170.000	379.170.000	-	-	52 Org	379.170.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bekasi	48 Org	48 Org	572.000.000	572.000.000	-	-	48 Org	572.000.000
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		-	88%	6.679.329.562	7.029.329.562			88%	7.241.566.562
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai NSPK		-	36 Lap	6.679.329.562	7.029.329.562			36 Lap	7.241.566.562
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	1 Paket	150.000.000	150.000.000	-	-	1 Paket	150.000.000
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	4 Paket	4 Paket	2.937.763.000	2.937.763.000	-	-	4 Paket	3.300.000.000
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	3 Paket	3 Paket	459.116.562	459.116.562	-	-	3 Paket	459.116.562
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	4 Dok	4 Dok	580.000.000	580.000.000	-	-	4 Dok	580.000.000
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	12 Lap	12 Lap	1.552.450.000	1.902.450.000	-	-	12 Lap	1.752.450.000
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	12 Lap	12 Lap	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	12 Lap	1.000.000.000
	Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Akuntabel		-	96.54%	1.200.000.000	1.678.596.000			96.54%	2.200.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Disediakan		-	1 Lap	1.200.000.000	1.678.596.000			1 Lap	2.200.000.000
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bekasi	220 Unit	349 Unit	1.200.000.000	1.678.596.000	-	-	220 Unit	2.200.000.000
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		-	88%	6.365.183.760	3.955.043.826			88%	1.475.000.000
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK		-	60 Lap	6.365.183.760	3.955.043.826			60 Lap	1.475.000.000
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bekasi	539 Lap	12 Lap	25.000.000	25.000.000	-	-	12 Lap	25.000.000
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bekasi	36 Lap	36 Lap	1.200.000.000	1.200.000.000	-	-	36 Lap	1.200.000.000
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Lap	12 Lap	5.140.183.760	2.730.043.260	-	-	12 Lap	250.000.000
	Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		-	96.54%	8.562.000.000	8.442.000.000			96.54%	10.792.000.000
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara		-	4 Lap	8.562.000.000	8.442.000.000			4 Lap	10.792.000.000
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kota Bekasi	1 Unit	0 Unit	120.000.000	-	-	-	0 Unit	-

RANCANGAN AKHIR RENJA PERUBAHAN 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya									
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	33 Unit	33 Unit	510.000.000	510.000.000	-	-	33 Unit	510.000.000
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	100 Unit	100 Unit	100.000.000	100.000.000	-	-	100 Unit	100.000.000
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bekasi	177 Unit	177 Unit	832.000.000	832.000.000	-	-	177 Unit	832.000.000
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bekasi	4 Unit	4 Unit	7.000.000.000	7.000.000.000	-	-	4 Unit	9.350.000.000
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		-	88%	71.579.191.382	71.579.191.382			88%	71.634.476.000
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan kesejahteraan DPRD		-	3 Lap	71.579.191.382	71.579.191.382			3 Lap	71.634.476.000
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kota Bekasi	650 Org /Bln	650 Org /Bln	70.644.191.382	70.644.191.382	-	-	650 Org /Bln	70.614.476.000
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kota Bekasi	6 Paket	6 Paket	770.000.000	770.000.000	-	-	6 Paket	770.000.000
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Kota Bekasi	50 Org	50 Org	165.000.000	165.000.000	-	-	50 Org	250.000.000

RANCANGAN AKHIR RENJA PERUBAHAN | 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		-	88%	1.000.000.000	1.040.000.000			88%	1.040.000.000
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD		-	13 Lap	1.000.000.000	1.040.000.000			13 Lap	1.040.000.000
4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kota Bekasi	-	1 Dok	-	40.000.000	-	-	1 Dok	40.000.000
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Bekasi	12 Lap	12 Lap	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	12 Lap	1.000.000.000
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				100%	126.399.040.428	97.507.255.139			100%	107.348.440.641
	Outcome : Meningkatkan kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan	Persentase Fasilitasi pembahasan Raperda menjadi Perda tahun N		-	100%	24.054.205.000	17.780.418.000			100%	20.638.181.000
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		-	6 Lap	24.054.205.000	17.780.418.000			6 Lap	20.638.181.000
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Bekasi	2 Dok	1 Dok	1.700.000.000	1.450.000.000	-	-	2 Dok	1.450.000.000
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Bekasi	10 Dok	1 Dok	9.104.205.000	6.682.250.000	-	-	10 Dok	6.682.250.000
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Kota Bekasi	10 Dok	1 Dok	5.000.000.000	4.135.068.000	-	-	10 Dok	4.492.831.000

RANCANGAN AKHIR RENJA PERUBAHAN | 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik yang difasilitasi	Kota Bekasi	7 Dok	1 Dok	7.500.000.000	5.122.010.000	-	-	7 Dok	5.122.010.000
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	Kota Bekasi	1 Dok	1 Dok	750.000.000	391.090.000	-	-	1 Dok	391.090.000
	Outcome: Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N		-	Tepat Waktu	7.586.420.000	4.100.000.000			Tepat Waktu	6.000.000.000
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran		-	6 Lap	7.586.420.000	4.100.000.000			6 Lap	6.000.000.000
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Bekasi	1 Dok	1 Dok	2.000.000.000	1.000.000.000	-	-	1 Dok	1.000.000.000
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Bekasi	1 Dok	1 Dok	1.500.000.000	500.000.000	-	-	1 Dok	1.500.000.000
4.02.02.2.02.03	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kota Bekasi	1 Dok	1 Dok	735.000.000	1.000.000.000	-	-	1 Dok	1.000.000.000
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kota Bekasi	1 Dok	1 Dok	1.116.420.000	750.000.000	-	-	1 Dok	1.000.000.000
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Kota Bekasi	1 Dok	1 Dok	735.000.000	350.000.000	-	-	1 Dok	500.000.000

RANCANGAN AKHIR RENJA PERUBAHAN 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Bekasi	1 Dok	1 Dok	1.500.000.000	500.000.000	-	-	1 Dok	1.000.000.000
	Outcome: Meningkatnya kualitas penganggaran dan Pengawasan	Persentase fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		-	100%	33.727.514.928	23.638.514.928			100%	26.027.561.056
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		-	51 Lap	33.727.514.928	23.638.514.928			51 Lap	26.027.561.056
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Bekasi	12 Lap	12 Lap	5.111.670.264	4.289.420.264	-	-	12 Lap	4.389.420.264
4.02.02.2.03.02	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Bekasi	12 Lap	12 Lap	5.111.670.264	4.289.420.264	-	-	12 Lap	4.389.420.264
4.02.02.2.03.03	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Bekasi	12 Lap	12 Lap	5.111.670.264	4.289.420.264	-	-	12 Lap	4.389.420.264
4.02.02.2.03.04	Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Bekasi	12 Lap	12 Lap	5.111.670.264	4.289.420.264	-	-	12 Lap	4.389.420.264
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kota Bekasi	1 Dok	1 Dok	1.700.000.000	1.000.000.000	-	-	1 Dok	1.000.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Bekasi	1 Dok	1 Dok	9.000.000.000	4.500.000.000	-	-	1 Dok	5.500.000.000
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kota Bekasi	1 Dok	1 Dok	2.580.833.872	980.833.872	-	-	1 Dok	1.969.880.000
	Outcome: Meningkatnya kualitas penganggaran dan Pengawasan	Persentase Fasilitas Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan DPRD		-	100%	61.030.900.500	51.988.322.211			100%	54.682.698.615
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD		-	24 lap	22.932.439.000	22.075.052.000			24 Lap	22.555.052.000
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Kota Bekasi	-	1 Dok	0	27.440.000	-	-	1 Dok	27.440.000
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kota Bekasi	6 Dok	6 Dok	5.834.827.000	4.750.000.000	-	-	6 Dok	5.250.000.000
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Bekasi	210 Org	210 Org	2.341.612.000	2.341.612.000	-	-	210 Org	2.821.612.000
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kota Bekasi	54 Org	72 Org	756.000.000	756.000.000	-	-	72 Org	756.000.000
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Bekasi	12 Dok	12 Dok	12.000.000.000	12.500.000.000	-	-	12 Dok	12.000.000.000
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Kota Bekasi	3 Dok	2 Dok	2.000.000.000	1.700.000.000	-	-	2 Dok	1.700.000.000

RANCANGAN AKHIR RENJA PERUBAHAN | 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		-	10 Lap	12.926.007.500	15.865.007.500			10 lap	16.615.007.500
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kota Bekasi	3 Lap	3 Lap	284.182.500	284.182.500	-	-	3 Lap	284.182.500
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun	Kota Bekasi	3 Dok	3 Dok	925.000.000	925.000.000	-	-	3 Dok	925.000.000
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kota Bekasi	3 Dok	3 Dok	11.716.825.000	12.855.826.000	-	-	3 Dok	13.605.825.000
4.02.02.2.05.04	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Kota Bekasi	-	7500 Orang	-	1.800.000.000	-	-	7500 Orang	1.800.000.000
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		-	12 Lap	3.089.068.000	2.089.068.000			12 Lap	2.089.068.000
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Bekasi	12 Lap	12 Lap	3.089.068.000	2.089.068.000	-	-	12 Lap	2.089.068.000
4.02.02.2.08	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD		-	16 Lap	22.083.386.000	11.959.194.711			17 Lap	13.423.571.115
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Bekasi	12 Dok	0 Dok	6.245.820.000	0	-	-	1 Dok	1.373.571.115
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	Kota Bekasi	1 Lap	1 Lap	1.500.000.000	659.194.711	-	-	3 Lap	750.000.000
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Badan Musyawarah	Kota Bekasi	3 Dok	3 Dok	13.037.566.000	10.000.000.000	-	-	3 Dok	10.000.000.000
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kota Bekasi	12 Dok	12 Dok	1.300.000.000	1.300.000.000	-	-	12 Dok	1.300.000.000
TOTAL						237.879.282.132	207.938.555.463				219.165.099.233

Sekretariat DPRD Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkedudukan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kota dalam bentuk Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi mempunyai fungsi pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan OPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi:

1. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;
2. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang meliputi Bagian Umum, Bagian Program dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan serta Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Sekretaris DPRD Kota Bekasi dibantu oleh 4 (empat) Kepala Bagian yaitu Kepala Bagian Program dan Keuangan, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 100 Seri D), Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkedudukan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota dalam bentuk Sekretariat DPRD. Struktur organisasi pada Sekretariat DPRD disajikan pada gambar berikut:

Gambar 3. 6

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi

2.



Sumber : Data diolah Bagian Program dan Keuangan, 2025

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:

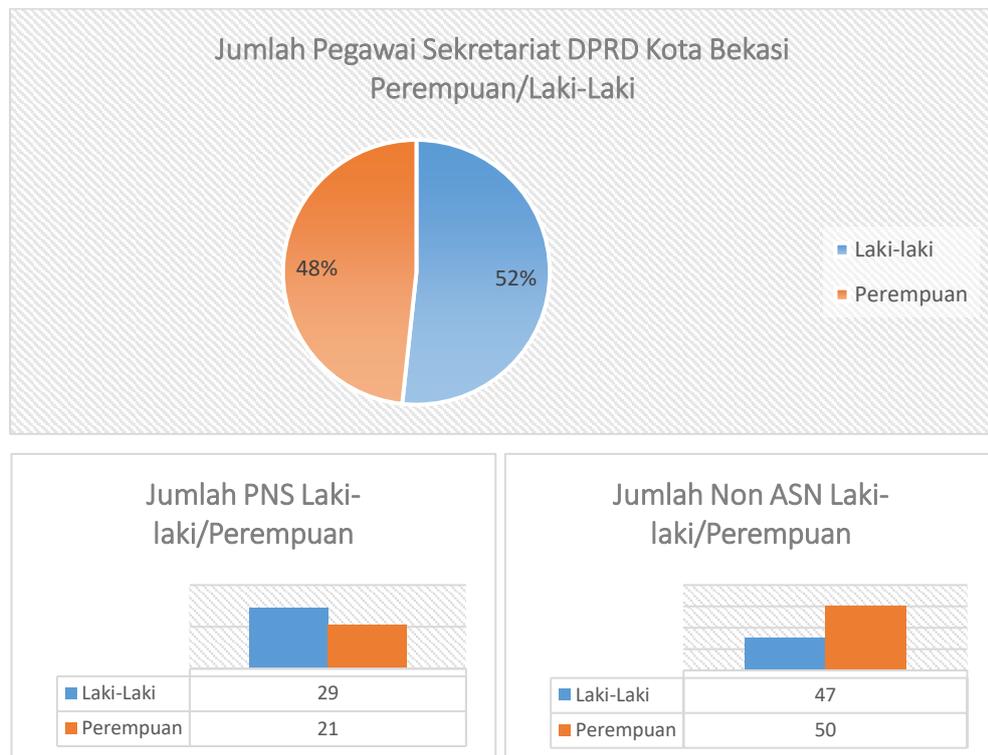
- a. Bagian Umum membawahkan:
 1. Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
- b. Bagian Program dan Keuangan
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana Peraturan Perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya, ditetapkan sub-koordinator pelaksana fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing yang mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi.

Salah satu indikator yang mendukung keberhasilan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari ASN dan Non ASN.

Chart 3.1

Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bekasi

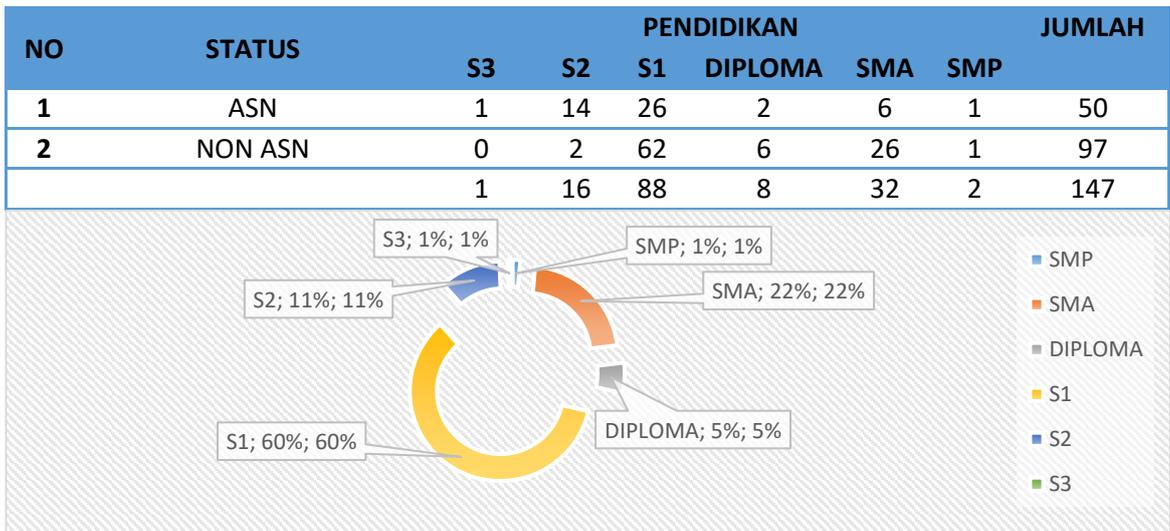


Sumber : <https://siap.bekasikota.go.id/> (Data Diolah 2025)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Bekasi didukung oleh 147 orang aparatur yang terdiri dari 29 orang laki-laki ASN dan 47 orang laki-laki Non ASN, 21 orang perempuan ASN dan 50 orang perempuan Non ASN seperti tampak pada infografis di atas, sehingga secara pengarusutamaan gender Jumlah pegawai perempuan dan laki-laki pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi cukup seimbang. Berdasarkan status kepegawaiannya, terdiri dari 50 orang PNS dan 97 orang Non ASN.

Adapun dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi, sebagian besar pegawai memiliki tingkat pendidikan S1, 11% dengan tingkat pendidikan S2, sedangkan yang lainnya adalah D3/S2, SMA, dan SMP, seperti tampak pada tabel berikut:

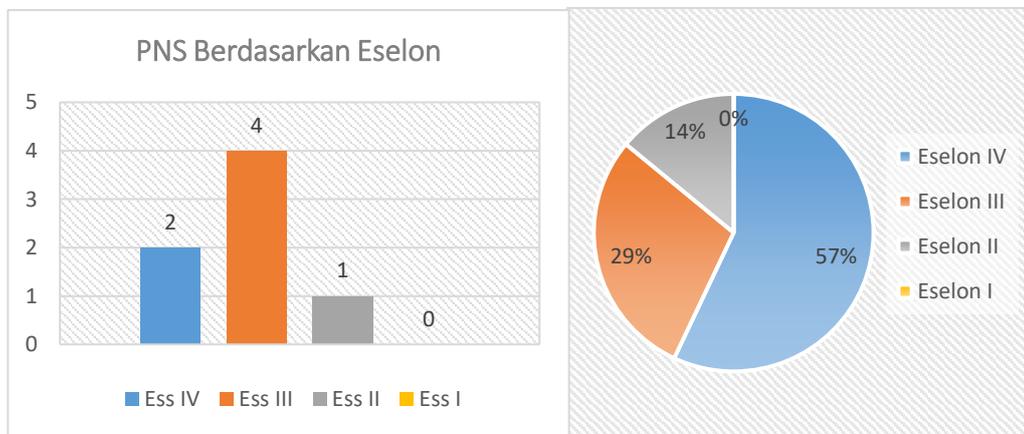
Chart 3. 2
Formasi Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

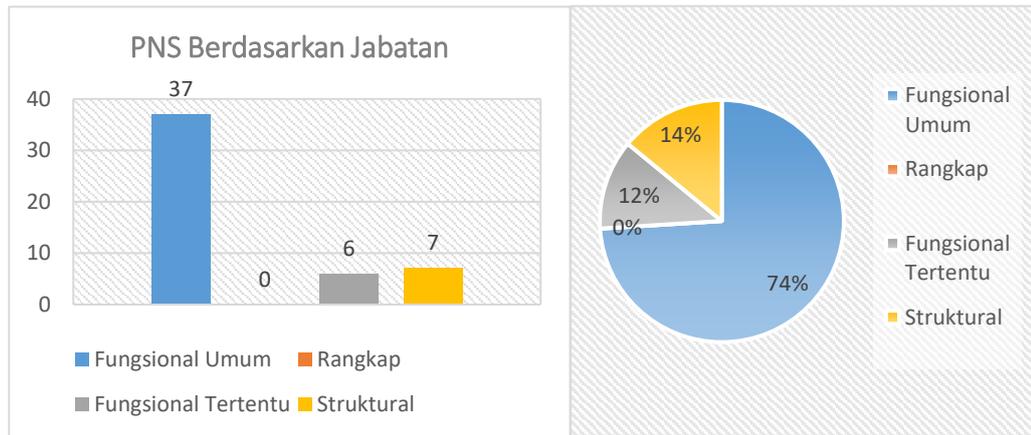


Sumber : <https://siap.bekasikota.go.id/> (Data Diolah 2025)

Secara kuantitas pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang yang mempunyai keahlian dibidang perencanaan, kehumasan, dan hukum. Untuk lebih jelasnya tampak pada infografis di bawah ini:

Chart 3. 3 Jumlah PNS Berdasarkan Tingket Eselon





Sumber : <https://siap.bekasikota.go.id/> (Data Diolah 2025)

Jumlah Esselon II adalah 1 orang, Jumlah Esselon III adalah 4 orang, Adapun jumlah Eselon IV adalah 2 (dua) orang, hal ini dikarenakan adanya penyederhanaan birokrasi sehingga 5 (lima) Eselon IV sebelumnya berubah menjadi jabatan fungsional tertentu. Penyederhanaan birokrasi diharapkan dalam pengambilan keputusan akan lebih cepat, sehingga baik pelayanan atau kinerja dapat dilakukan dengan cepat dan responsif. Sekretariat DPRD Kota Bekasi juga memiliki Arsiparis sehingga total Fungsional tertentu adalah 6 orang, dan fungsional umum adalah 37 orang.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD
KOTA BEKASI

Menindaklanjuti Pada tahun berjalan 2025 terdapat Surat Edaran Wakil Wali Kota Bekasi Nomor: 000.7.2.4/1053/Bappelitbangda.AP4EP tanggal 24 Pebruari 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Pebruari 2025 tentang Penyesuaian Arah kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Sekretariat DPRD Kota Bekasi berkewajiban menyusun Perubahan Renja.

Adapun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 terdapat perubahan dan penambahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan maupun anggaran sebagaimana berikut :

Tabel 4. 1

Rencana Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Ket	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
				Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah
1	2	3	4	5		6		7
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				100%	111.480.241.704	110.431.300.324	
	Outcome : Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		-	98%	80.000.000	80.000.000	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK		-	7 Dok	80.000.000	80.000.000	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	12 Dok	3 Dok	40.000.000	40.000.000	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Ket	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
				Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah
1	2	3	4	5		6	7	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	3 Lap	4 Lap	40.000.000	40.000.000	-
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		-	88%	15.063.367.000	15.675.969.554	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK		-	18 Lap	15.063.367.000	15.675.969.554	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	2,086 Org/Bln	2,086 Org/Bln	14.999.367.000	15.611.969.554	-
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	2 Lap	2 Lap	40.000.000	40.000.000	-
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Kota Bekasi	15 Lap	15 Lap	24.000.000	24.000.000	-
	Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		-	86.2%	951.170.000	951.170.000	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun sesuai NSPK		-	2 Lap	951.170.000	951.170.000	
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	52 Org	52 Org	379.170.000	379.170.000	-
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bekasi	48 Org	48 Org	572.000.000	572.000.000	-
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		-	88%	6.679.329.562	7.029.329.562	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun sesuai NSPK		-	36 Lap	6.679.329.562	7.029.329.562	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	1 Paket	150.000.000	150.000.000	-
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	4 Paket	4 Paket	2.937.763.000	2.937.763.000	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025					Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5		6		7
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	3 Paket	3 Paket	459.116.562	459.116.562	-
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	4 Dok	4 Dok	580.000.000	580.000.000	-
4.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	12 Lap	12 Lap	1.552.450.000	1.902.450.000	-
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	12 Lap	12 Lap	1.000.000.000	1.000.000.000	-
	Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Akuntabel		-	96.54%	1.200.000.000	1.678.596.000	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Disediakan		-	1 Lap	1.200.000.000	1.678.596.000	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bekasi	220 Unit	349 Unit	1.200.000.000	1.678.596.000	-
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		-	88%	6.365.183.760	3.955.043.826	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK		-	60 Lap	6.365.183.760	3.955.043.826	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bekasi	539 Lap	12 Lap	25.000.000	25.000.000	-
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bekasi	36 Lap	36 Lap	1.200.000.000	1.200.000.000	-
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Lap	12 Lap	5.140.183.760	2.730.043.26	-
	Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		-	96.54%	8.562.000.000	8.442.000.000	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara		-	4 Lap	8.562.000.000	8.442.000.000	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	1 Unit	0 Unit	120.000.000	-	-
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	33 Unit	33 Unit	510.000.000	510.000.000	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025					Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5		6		7
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	100 Unit	100 Unit	100.000.000	100.000.000	-
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bekasi	177 Unit	177 Unit	832.000.000	832.000.000	-
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bekasi	4 Unit	4 Unit	7.000.000.000	7.000.000.000	-
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		-	88%	71.579.191.382	71.579.191.382	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan kesejahteraan DPRD		-	3 Lap	71.579.191.382	71.579.191.382	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kota Bekasi	650 Org /Bln	650 Org /Bln	70.644.191.382	70.644.191.382	-
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kota Bekasi	6 Paket	6 Paket	770.000.000	770.000.000	-
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Kota Bekasi	50 Org	50 Org	165.000.000	165.000.000	-
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		-	88%	1.000.000.000	1.040.000.000	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD		-	13 Lap	1.000.000.000	1.040.000.000	
4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kota Bekasi	-	1 Dok	-	40.000.000	-
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Bekasi	12 Lap	12 Lap	1.000.000.000	1.000.000.000	-
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				100%	126.399.040.428	97.507.255.139	
	Outcome : Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Fasilitasi pembahasan Raperda menjadi Perda tahun N		-	100%	24.054.205.000	17.780.418.000	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		-	5 Lap	24.054.205.000	17.780.418.000	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Bekasi	2 Dok	1 Dok	1.700.000.000	1.450.000.000	-
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Bekasi	10 Dok	1 Dok	9.104.205.000	6.682.250.000	-
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Kota Bekasi	10 Dok	1 Dok	5.000.000.000	4.135.068.000	-
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik yang difasilitasi	Kota Bekasi	7 Dok	1 Dok	7.500.000.000	5.122.010.000	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025					Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5		6		7
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	Kota Bekasi	1 Dok	1 Dok	750.000.000	391.090.000	-
	Outcome: Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N		-	Tepat Waktu	7.586.420.000	4.100.000.000	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran		-	6 Lap	7.586.420.000	4.100.000.000	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Bekasi	1 Dok	1 Dok	2.000.000.000	1.000.000.000	-
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Bekasi	1 Dok	1 Dok	1.500.000.000	500.000.000	-
4.02.02.2.02.03	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kota Bekasi	1 Dok	1 Dok	735.000.000	1.000.000.000	-
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kota Bekasi	1 Dok	1 Dok	1.116.420.000	750.000.000	-
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Kota Bekasi	1 Dok	1 Dok	735.000.000	350.000.000	-
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Bekasi	1 Dok	1 Dok	1.500.000.000	500.000.000	-
	Outcome: Meningkatnya kualitas penganggaran dan Pengawasan	Persentase fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		-	100%	33.727.514.928	23.638.514.928	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan		-	51 Lap	33.727.514.928	23.638.514.928	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Bekasi	12 Lap	12 Lap	5.111.670.264	4.289.420.264	-
4.02.02.2.03.02	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Bekasi	12 Lap	12 Lap	5.111.670.264	4.289.420.264	-
4.02.02.2.03.03	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Bekasi	12 Lap	12 Lap	5.111.670.264	4.289.420.264	-
4.02.02.2.03.04	Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Bekasi	12 Lap	12 Lap	5.111.670.264	4.289.420.264	-
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kota Bekasi	1 Dok	1 Dok	1.700.000.000	1.000.000.000	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025					Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5		6		7
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Bekasi	1 Dok	1 Dok	9.000.000.000	4.500.000.000	-
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kota Bekasi	1 Dok	1 Dok	2.580.833.872	980.833.872	-
	Outcome: Meningkatnya kualitas penganggaran dan Pengawasan	Persentase Fasilitas Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan DPRD		-	100%	61.030.900.500	51.988.322.211	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD		-	24 Lap	22.932.439.000	22.075.052.000	
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Kota Bekasi	-	1 Dok	0	27.440.000	-
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kota Bekasi	6 Dok	6 Dok	5.834.827.000	4.750.000.000	-
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Bekasi	210 Org	210 Org	2.341.612.000	2.341.612.000	-
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kota Bekasi	54 Org	72 Org	756.000.000	756.000.000	-
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Bekasi	12 Dok	12 Dok	12.000.000.000	12.500.000.000	-
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Kota Bekasi	3 Dok	2 Dok	2.000.000.000	1.700.000.000	-
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		-	10 Lap	12.926.007.500	15.865.007.500	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kota Bekasi	3 Lap	3 Lap	284.182.500	284.182.500	-
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun	Kota Bekasi	3 Dok	3 Dok	925.000.000	925.000.000	-
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kota Bekasi	3 Dok	3 Dok	11.716.825.000	12.855.825.000	-
4.02.02.2.05.04	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Kota Bekasi	-	7500 Orang	-	1.800.000.000	-
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		-	12 Lap	3.089.068.000	2.089.068.000	
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Bekasi	12 Lap	12 Lap	3.089.068.000	2.089.068.000	-
4.02.02.2.08	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan Fasilitas Tugas DPRD		-	16 Lap	22.083.386.000	11.959.194.711	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Bekasi	12 Dok	0 Dok	6.245.820.000	0	-
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	Kota Bekasi	1 Lap	1 Lap	1.500.000.000	659.194.711	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Ket	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
				Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah
1	2	3	4	5		6		7
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Badan Musyawarah	Kota Bekasi	3 Dok	3 Dok	13.037.566.000	10.000.000.000	-
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasulitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kota Bekasi	12 Dok	12 Dok	1.300.000.000	1.300.000.000	-
TOTAL						237.879.282.132	207.938.555.463	

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 sampai Triwulan II Tahun 2025 yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan yang telah teridentifikasi sehingga diharapkan akan mampu menjawab permasalahan dan memperbaiki kualitas *output* perencanaan dan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang dilakukan oleh berbagai komponen pemerintah daerah.

Adapun kaidah pelaksanaan perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi;
2. Seluruh komponen bagian, sub bagian pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi, agar melaksanakan Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya;
3. Program-program yang tercantum dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025, diupayakan untuk dilaksanakan seluruhnya dengan memperhatikan prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran;

4. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
5. Agar Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap komponen Sekretariat DPRD Kota Bekasi diharapkan mengupayakan penguatan peran stakeholder dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target-target RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Instansi terkait maupun masyarakat luas;
6. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025, sebagai berikut:
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing bagian;
 - b. Sekretaris DPRD Kota Bekasi menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Kepala Bagian melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RENJA bagian periode sebelumnya;
 - d. Sekretaris DPRD Kota Bekasi menyusun evaluasi RENJA berdasarkan hasil evaluasi bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan Renja untuk periode berikutnya;

